



B N P B

GEMA BNPB

Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana

Laporan Utama

Karhutla Riau *Ini Pembakaran Bukan Kebakaran*



27

Fokus Berita
Kabupaten Blitar
dalam Erupsi
Kelud

51

Liputan Khusus
Gelar MMDirex 2014
Padang - Mentawai

Daftar Isi

Mei 2014 Vol. 5 No. 1

- 3** Pengantar Redaksi



4

Laporan Utama

- 4** Karhutla Riau Ini Pembakaran Bukan Kebakaran
9 Arahan dan Kebijakan SBY Atasi Karhutla Riau
13 Berhasil Tiga Minggu Operasi Pemadaman Api dan Asap Riau
19 Ancaman Asap Riau Masih di Depan Mata
23 Gerakan Bersama untuk Solusi Tuntas Riau Bebas Asap



27

Fokus Berita

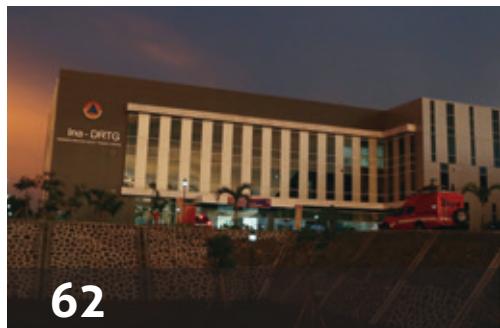
- 27** Kabupaten Blitar dalam Erupsi Kelud
34 Keberhasilan Kesiapsiagaan Penduduk Kaki Gunung Kelud
38 Geliat Gunungapi Sinabung
45 Rakornas Penanggulangan Bencana Cepat, Tepat dan Menyentuh Rakyat
48 Menyapa Merapi dan Slamet

Liputan Khusus

- 51** Gelar MMDirex 2014 Padang - Mentawai
54 Bantuan Indonesia untuk Bencana Haiyan Filipina
56 BNPB Jadikan Wartawan Tangguh Melalui Forkom Wartawan



51



62

Teropong

- 59** Lebih 500 Bencana pada Triwulan Pertama Tahun 2014
62 INADRTG Fasilitasi Profesionalitas PB Indonesia



66

Profil

- 66** Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Ir. Tri Budiarto, M.Si.

Snapshot

Pengantar Redaksi

Edisi pertama majalah GEMA BNPB Mei 2014 mengangkat laporan utama mengenai bencana asap di Provinsi Riau yang terjadi pada Maret 2014 lalu. Tulisan mengenai bencana asap ini diangkat karena dampak yang luar biasa tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga kerugian lain seperti perekonomian dan aktivitas masyarakat terganggu dan rusaknya ekosistem lingkungan. Bencana asap Riau juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]. Beliau secara langsung memimpin penanggulangan bencana asap sebagai Komando Pengendali dan segera membentuk Satuan Tugas Operasi Terpadu Penanggulangan Bencana Asap.

Di samping itu, majalah GEMA BNPB juga mengupas tentang bencana-bencana lain yang terjadi sejak awal tahun hingga bulan kelima tahun 2014, antara lain erupsi Gunungapi Sinabung dan Kelud. Bencana erupsi gunung api tersebut juga mendapatkan perhatian dari Presiden SBY. Tampaknya geliat aktivitas gunungapi masih mewarnai potensi bencana di negeri ini dengan perkembangan terkini beberapa kenaikan status gunungapi seperti Slamet, Merapi, dan Soputan.

Topik pencegahan dan kesiapsiagaan tertuang dalam artikel mengenai *Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise* yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Sumatera Barat. Majalah GEMA BNPB juga memuat artikel-artikel antara lain analisis bencana hingga bulan ketiga, kegiatan forum komunikasi wartawan Jawa Timur, dan profil Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Demikian sekilas pengantar untuk majalah GEMA BNPB pada edisi pertama tahun 2014. Semoga majalah ini memberikan pengetahuan dan informasi serta bermanfaat untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Salam tangguh!

Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU
Kepala Pusat, Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB



Penanggung Jawab Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas **Editor** I Gusti Ayu Arlita NK, Ario Akbar Lomban, Theophilus Yanuarto, Rusnadi Suyatman Putra, Slamet Riyadi **Fotografer** Andri Cipto Utomo **Desain Grafis** Ignatius Toto Satrio **Alamat Redaksi** Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Data, Informasi dan Humas, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Telp : 021-3458400 Fax : 021-3458500 Email : majalahgema@bnpb.go.id

Karhutla Riau

Ini Pembakaran Bukan Kebakaran



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif harus melakukan perjalanan darat dari Padang, Sumatera Barat menuju Pekanbaru, Riau pada 13 Maret 2014. Saat itu kabut asap masih menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Sementara itu Bandara Minangkabau Padang pun belum berjalan normal karena aktivitas penerbangan sangat bergantung pada jarak pandang atau *visibility*. Setibanya di Padang, kabut dan bau asap dapat dirasakan meskipun kota ini dengan sumber asap berjarak ratusan kilometer. Malam itu juga rombongan Kepala BNPB yang didampingi Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Dody Ruswandi melanjutkan perjalanan darat menuju Pekanbaru. Menjelang tiba di Pekanbaru, kabut dan bau asap semakin terasa kuat. Asap tipis masih terasa meskipun rombongan sudah memasuki lobi hotel.



Keesokan hari Syamsul Maarif menuju ke Kantor Kepolisian Daerah [Polda] Riau untuk melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri. Hari itu juga telah diagendakan diskusi melalui *teleconference* antara Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] dengan Kepala BNPB yang didampingi Wakil Gubernur Riau, Komandan Korem 031/Wira Bima,

Kepala Polda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam *teleconference* tersebut, Presiden SBY memberikan arahan dan instruksi kepada Kepala BNPB terkait penanggulangan bencana asap yang terjadi di Provinsi Riau. Presiden SBY sebagai pengendali operasi penanggulangan bencana [PB] menunjuk Kepala BNPB sebagai Komandan Satuan Tugas Operasi [Satgas Ops] Terpadu PB Asap Riau. Kemudian Pemerintah Pusat memobilisasi sumber daya, salah satunya pengiriman 1.000 personil Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana [PRC PB] dari unsur gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.

Menanggulangi bencana asap ini, kementerian/lembaga, dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta unsur TNI dan Polri di tingkat kewilayahan berada di bawah komando Satgas Ops Terpadu. Selanjutnya operasi pemadaman api dan asap dilakukan berdasarkan pada hasil rapat koordinasi di Pos Komando Satgas Ops Terpadu yang berlokasi di Lapangan Udara Roesman Nurjadin, Pekanbaru. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas penyusunan rencana operasi bersama dan evaluasi kegiatan.

Tanpa mengenal hari libur, Satgas Ops berupaya untuk mengidentifikasi titik panas atau *hotspot* dan kemudian memadamkan titik-titik api dan asap yang ditemui di wilayah Provinsi Riau.

Sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden SBY, Satgas Ops Terpadu memiliki Satgas Pemadaman Api dan Asap yang terdiri dari Sub Satgas Darat dan Udara. Satgas ini berupaya keras untuk memadamkan api dan asap yang tersebar di hampir semua wilayah Riau. Ribuan personil TNI dan Polri di tingkat teritorial dan kewilayahan dengan dibantu personil Manggala Agni, masyarakat dan relawan berjuang keras untuk memadamkan api dan asap.

Di samping Satgas Pemadaman Api dan Asap, Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dan Satgas Penegakan Hukum [gakkum] berperan dalam operasi ini. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan mendirikan pos-pos kesehatan di beberapa titik, sedangkan Satgas Gakkum melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik itu dari individu, kelompok, maupun korporasi. Presiden SBY memberikan waktu 22 hari untuk Satgas Ops Terpadu untuk penanggulangan bencana asap Riau.

Setiap operasi dari Satgas-satgas ini yang berada di bawah komando Pokso Satgas Ops Terpadu dikoordinasikan pada rapat pagi jam 08.00 dan sore hari jam 17.00 waktu setempat. Wakil Komandan Satgas Ops Terpadu Mayor Jenderal TNI Iskandar M. Sahil memimpin operasi yang didampingi oleh unsur terkait dari BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, Danrem 031/WB, Kapolda, dan Danlanud.

Ini Pembakaran, Bukan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau disebabkan oleh unsur kesengajaan. Lebih dari 90% hutan dan lahan sengaja dibakar. Pembakaran hutan dan lahan merupakan cara yang murah dan mudah untuk mempersiapkan lahan yang siap ditanami kembali. Pembakaran lahan memang salah cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, modus pembakaran hutan dan lahan di Riau adalah efisiensi. "Pembukaan lahan dilakukan dengan membakar membutuhkan biaya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per hektar, sedangkan dengan peralatan pengolahan lahan bisa mencapai Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per hektar", jelas beliau.

Namun demikian apabila pembakaran dilakukan secara masif, bencana

asap tidak dapat dihindari. Permasalahan karhutla ini dipicu oleh upaya-upaya perluasan hutan dan lahan untuk pemanfaatan secara ekonomi baik perorangan, kelompok, maupun korporasi. Perluasan tersebut dilakukan dengan cara illegal dan memanfaatkan celah hukum di tingkat administrasi paling bawah.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau mencatat bahwa hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Riau sampai dengan 14 Maret 2014 mencapai 2.123 ha. Kebakaran yang terbesar terjadi di kawasan hutan tanaman industri [HTI] seluas 652 ha. Sementara itu Manggala Agni yang di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam [BBKSDA] melaporkan luasan kawasan konservasi yang terbakar mencapai 5.434 ha hingga 29 Maret 2014.

Presiden SBY menyebut aksi pembakaran ini sebagai *extraordinary crime*. Dapat dibayangkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen sedangkan oksigen yang dihirup jutaan masyarakat tersebut telah tercemar asap. Ketika masyarakat tidak beraktivitas dan tetap tinggal di dalam rumah pun, mereka tetap menghirup asap kebakaran. Beliau mengingatkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas para pelaku dan pihak-pihak di belakang pembakaran hutan dan lahan. Hukuman berlapis diterapkan sehingga hukuman menjadi berat dan

ada efek jera. Hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya Satgas Penegakan Hukum yang beroperasi dengan satgas lainnya.

Meskipun pihak kepolisian telah mengeluarkan Maklumat Kapolda Riau Nomor MAK/1/III/2014 Tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan, aksi tetap dilakukan oleh oknum-oknum baik individu, kelompok, maupun korporasi. Pihak Satgas Gakkum yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigjen [Pol] Condro Kirono telah mengembangkan kasus terkait dengan pembakaran hutan dan lahan. Satgas Gakkum telah membuat 62 laporan polisi dengan menetapkan 104 orang tersangka, termasuk 1 korporasi. Dalam penegakan hukum ini, beberapa institusi penegak hukum, seperti Bareskrim Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta pihak Kejaksaan membantu pihak Polda Riau.

Operasi Pemadaman Api dan Asap

Karhutla tahun 2014 merupakan bencana asap yang sangat parah. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu indikator kualitas udara yang diukur melalui Indeks Standard Pencemaran Udara [ISPU] selama Maret 2014. Wilayah-wilayah yang terpantau alat pengukur kualitas udaranya, seperti

Siaik, Kandis, Perawang dan lainnya berada pada kondisi berbahaya. Tidak hanya berdampak pada kualitas kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian dan aktivitas keseharian masyarakat yang terganggu. ISPU yang terpantau pada 1 – 25 Maret 2014 di wilayah Riau ditunjukkan pada tabel di halaman 9.

Panglima TNI segera memerintahkan untuk apel siaga pada Kamis sore, 13 Maret 2014, setelah dilakukannya *teleconference*. Seperti tahun lalu, Panglima TNI mengerahkan 1.000 personil dari berbagai kesatuan seperti Kostrad, Zikon dari TNI AD, Marinir dari TNI AL, Paskhas dari TNI AU, dan Brigadir Mobil [Brimob] dari Polri. Keesokan hari mereka telah tergabung dengan Sub Satgas Darat yang sebelumnya telah terbentuk dari militer di tingkat teritorial dan kewilayahan.

Operasi pemadaman api dan asap ini berada di bawah koordinasi Satgas Pemadaman Api dan Asap yang terdiri atas Sub Satgas Darat dan Sub Satgas Udara. Sub Satgas Darat beranggotakan TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan. Manggala Agni merupakan brigade pengendali kebakaran hutan Indonesia yang dibentuk di bawah Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan.

Api yang telah dipadamkan tak lantas ditinggalkan begitu saja. Satgas tetap memastikan asap benar-benar hilang. Apabila bekas kebakaran ada di lahan gambut, mereka menanamkan air hingga ke dalam gambut dan terus melakukan *mopping up* atau pemadaman hingga tuntas. Selama melakukan operasi pemadaman, satgas menghadapi banyak kendala dari sisi internal dan eksternal. Kendala internal yang dialami seperti keterbatasan selang air yang kurang panjang, tidak ada persiapan bak atau sumur penampungan air di hutan dan lahan, personil, sedangkan faktor eksternal antar lain sumber air yang terbatas, lokasi yang sulit ditembus, angin berputar, atau pun cuaca kering, serta para oknum yang terus membakar hutan dan lahan.

Sementara itu, Sub Satgas Udara memiliki peran yang sangat signifikan khususnya dalam melakukan teknologi modifikasi cuaca [TMC]. Sub Satgas ini tidak hanya terdiri atas tim TMC, tetapi juga operasi pengeboman air atau *water bombing* dan survei udara atau *recce*. Tim TMC dikomandoi oleh tim Badan Penkajian dan Penerapan Teknologi [BPPT] dan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG]. Melalui radar BMKG, perkiraan kelembaban, tekanan udara, arah angin, dan potensi pertumbuhan awan dapat dipantau sehingga data-data tersebut menjadi panduan

BPPT untuk menyemai garam [NaCl] pada wilayah dan ketinggian tertentu.

Sekilas Kawasan Riau

Provinsi Riau merupakan wilayah yang kaya akan sumber alamnya, salah satunya dipenuhi dengan kawasan hutan. Kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan dan dipetakan sebagai kawasan hutan konservasi, lindung, dan produksi. Data Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau Tahun 2012 menyebutkan bahwa kawasan seluas 7.127.237 ha terbagi menjadi kawasan yang berfungsi sebagai hutan produksi [HP], hutan produksi terbatas [HPT], konservasi, hutan lindung [HL], dan hutan produksi konservasi [HPK].

Kawasan hutan yang sangat luas inilah yang kemudian memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan [Karhutla]. Setiap tahun di wilayah Riau dan sekitarnya, masyarakat harus menghirup asap yang ditimbulkan karhutla. Hak setiap orang untuk menghirup udara segar terampas sebagai dampak karhutla. Sebagai catatan bahwa *hotspot* atau titik panas yang terpantau pada citra satelit NOAA 18, pada Februari 2014 mencapai 2.208 titik, sedangkan pada Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2014 mencapai 1.398 titik. Kualitas udara pun menunjukkan pada kondisi berbahaya di hampir seluruh wilayah Riau pada Maret 2014. Dapat dibayangkan

bahwa jutaan masyarakat terpapar kabut asap ini, tidak hanya masyarakat di Riau tetapi mereka yang berada di sekitar provinsi ini dimana arah angin berhembus.

Permasalahan pemadaman api dan asap di Riau ini disebabkan karena tanaman gambut yang memiliki karakteristik khusus. Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam [BBKSDA] Riau menyebutkan luas lahan gambut di provinsi ini mencapai 56% dari luas daratan Provinsi Riau atau sekitar 4,09 juta hektar. Gambut sangat mendapatkan perhatian dunia karena

sangat berkontribusi dalam pengurangan dampak perubahan iklim. Gambut memiliki nilai yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Gambut berperan dalam kehidupan antara lain dalam keseimbangan ekosistem, kestabilan iklim global, dan bermanfaat untuk sumber air yang berasal dari curah hujan.

Namun pada kenyataan hal ini sangat kontraproduktif dimana para oknum sengaja membakar gambut untuk keperluan lahan produksi. Permasalahan karhutla ini dipicu oleh upaya-

upaya perluasan lahan dan hutan untuk pemanfaatan secara ekonomi baik oleh perorangan, kelompok, dan perusahaan. Karhutla tahun ini kembali menarik perhatian secara nasional untuk membantu pemerintah daerah setempat untuk penanggulangannya, khususnya bencana asap. Hal tersebut menjadi isu nasional karena karhutla ini tidak hanya terjadi di wilayah Riau tetapi juga di 9 provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, karhutla ini telah mengakibatkan 2.398 Ha cagar biosfer terbakar dan 21.914 Ha lahan terbakar.[phi]

Tabel 1. Perkembangan Indeks Standar Pencemaran Udara [ISPU]

NO	WILAYAH [ISPU]	PERKEMBANGAN INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA [ISPU]																			
		MARET 2014																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	RUMBIAI	84,5	135	137	172	85	124	101	192	359,3	148	163	321	310	500	238,5	106	68	40	40	99
2	MINAS	107	144	174	159	84	84	75	380	500	120	301	403	388	500	154	111	55	42	42	83
3	DURI CAMP	135	324	500	158	96	94	154	438	500	409	191	418	500	500	330	97	26	87	87	97
4	DURI FIELD	224	361	361	285	153	170	186	426	500	500	403	431	500	500	398	189	73	81	81	138
5	DUMAI	-	218	500	153	115	57	37	225	391	57	228	183	500	310	313	40	63	93	93	107
6	PKU KOTA	155	174	178	-	177	-	141	-	-	294	241	305	345	500	351	119	-	37	37	58
7	PKU REGIONAL	-	-	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-
8	SIAK	500	500	500	531	500	500	116	500	348	500	-	500	500	500	288	-	500	-	177	32
9	KANDIS	500	500	500	296	500	500	500	500	434	500	-	-	-	500	250	-	102	-	75	101
10	PERAWANG	500	500	500	183	500	302	500	500	454	500	-	500	500	500	295	-	486	-	-	133
11	BANGKO	100	500	500	136	159	212	445	500	500	500	500	500	500	500	500	270	96	112	112	151
12	LIBO	-	500	-	190	128	500	305	500	500	449	449	500	500	500	500	401	71	142	142	130
13	PANAM	-	-	265	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
14	PETAPAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	147	172	155	274	500	131	97	37	44	-	-	74
15	P. PENGARAIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	-	-	-	-

KEPMEN LH No. KEP-45/MENLH/10/1997 TENTANG ISPU	
BAIK [GOOD]	0 - 50
SEDANG [MODERATE]	51 - 100
TIDAK SEHAT [UNHEALTHY]	101 - 199
SANGAT TIDAK SEHAT [VERY UNHEALTHY]	200 - 299
BERBAHAYA [HAZARDOUS]	300 lebih

Sumber : BNPB

Arahan dan Kebijakan SBY Atasi Karhutla Riau

Kondisi bencana asap semakin memburuk, Pemerintah Provinsi Riau semakin tidak mampu untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan [karhutla] yang terjadi di wilayahnya. Sepanjang Februari 2014 terpantau dari citra satelit *National Oceanic Atmospheric Administration* [NOAA] 18 hotspot di wilayah

Riau sebanyak 1.272 titik. BNPB segera mengambil tindakan dengan melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY].

Pada 14 Maret 2014, Presiden SBY dan jajaran tinggi pemerintah pusat melakukan *teleconference*

dengan Kepala BNPB yang didampingi Wakil Gubernur Riau Danrem 031/WB, Kapolda dan Kajati. Pada kesempatan itu, Presiden SBY memberikan arahan dan instruksi penanggulangan bencana asap. Berikut arahan dan instruksi Presiden SBY yang disampaikan melalui *teleconference* pada 14 Maret 2014 :

Arahan dan Instruksi Presiden SBY

- 1 Segera membentuk Satuan Tugas Operasi [Satgas Ops] Terpadu Penanggulangan Bencana Asap di Riau, terdiri dari Satgas Pemadaman Api dan Asap, Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan, dan Satgas Penegakan Hukum.
- 2 Ketiga kegiatan utama ini berjalan secara simultan dan dipimpin langsung oleh Kepala BNPB.
- 3 Sebagai Wakil Komandan Satgas Ops ditunjuk satu perwira tinggi dari TNI ber pangkat Mayor Jenderal yang juga akan membantu penuh dan ikut mengendalikan operasi di lapangan. Komandan Satgas Pemadaman Api dan Asap dijabat oleh Komandan Korem. Satgas Pelayanan dan Perawatan Kesehatan ditunjuk pejabat senior dari instansi kesehatan wilayah. Satgas Penegakan Hukum dipimpin oleh Kapolda Riau bersama dengan unsur kejaksaan daerah dan penegak hukum yang lain.
- 4 Peningkatan operasi terpadu akan dilaksanakan selama 3 minggu. Dengan catatan, mana kala masih diperlukan atau ada perubahan keadaan karena kita tidak bisa dikontrol unsur iklim dan cuaca, maka bisa diperpanjang.

Terkait dengan penegakan hukum, Presiden SBY mengingatkan untuk diperkuat dan ditingkatkan efektifitasnya agar dapat memberikan dampak psikologis yang bagus dan efek jera bagi pelaku. Presiden SBY menegaskan bahwa bencana asap seperti ini jangan berulang-ulang. Di samping penegakan hukum, langkah antisipatif semua pihak sangat penting untuk diaktifkan kembali. "Pencegahan sangat penting, harus di mulai dari pejabat daerah, dari bupati dan walikota ke bawah yang mengetahui kegiatan masyarakatnya", demikian tambah Presiden SBY.

Puluhan ribu harus memakai masker, sekolah tutup, masyarakat tidak bekerja, udara pekat, ini kejahatan kemanusiaan.

Presiden SBY sangat serius dalam penanggulangan bencana asap ini. Beliau dengan segera menjadwalkan kunjungan ke Provinsi Riau yang diputuskan pada teleconference tadi. Setibanya di Pekanbaru pada Sabtu, 15 Maret 2014, pukul 16.51 WIB, Presiden RI SBY melakukan

diskusi dengan BNBP dan unsur-unsur terkait. Presiden SBY menegaskan bahwa penegakan hukum harus tegas dan masalah kebakaran hutan dan lahan yang telah menimbulkan dampak terhadap ribuan masyarakat ini tidak berulang-ulang. Berhari-hari masyarakat menderita karena harus menghirup



udara dengan kualitas yang berbahaya. "Puluhan ribu harus memakai masker, sekolah tutup, masyarakat tidak bekerja, udara pekat, ini kejahatan kemanusiaan", jelas beliau.

Presiden SBY juga mengatakan bahwa jangan ada orang melakukan kejahatan terus menurus dianggap biasa. "Sekian ribu menderita karena asap ini kejahatan", kata Presiden SBY.

Terkait dengan situasi bencana asap Riau, Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi krisis cara berpikir kita juga dengan manajemen krisis. Pada konteks tersebut, pihak-pihak atau oknum yang melakukan pembakaran lahan dan hutan sehingga memberikan dampak yang luas harus ditindak secara tegas. Penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam penyelesaian secara tuntas dalam penanggulangan bencana asap Riau. Di samping itu, penegakan hukum diharapkan nantinya dapat menimbulkan efek jera dan tidak diikuti yang lain.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif menambahkan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan bagi pelanggaran tersebut, hanya di bawah 1 tahun. Senada dengan penjelasan Presiden SBY bahwa apa yang terjadi di Riau ini sebagai kejahatan,

“

Dalam 3 minggu asap harus hilang dan titik api dipadamkan.

Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana asap ini adalah hilangnya asap, masyarakat yang sakit disembuhkan, dan pelaku ditangkap dan diproses secara hukum.

”

Syamsul Maarif berpendapat bahwa mereka harus dihukum berat.

Presiden SBY secara tegas menekankan untuk memetakan wilayah di kecamatan dan kabupaten mana yang lahan atau hutannya terbakar dan pengusutan secara tuntas. "Mari kali ini kita lakukan untuk kepentingan saudara-saudara kita di Riau. Kita tunjukkan dan dapatkan betul apa yang menjadi penyebabnya. Penegakan hukum harus tegas", jelas SBY.

Pada akhir pertemuan, Presiden SBY menekankan kembali bahwa dalam tiga minggu asap harus

hilang dan titik api dipadamkan. Menurut beliau, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana asap ini adalah hilangnya asap, masyarakat yang sakit disembuhkan, dan pelaku ditangkap dan diproses secara hukum.

Selama berkunjung ke Pekanbaru, Presiden SBY bertemu dengan para pengusaha yang terkait dengan permasalahan kebakaran lahan dan hutan serta melakukan pertemuan dengan masyarakat Bangkinang yang selama ini menghirup asap akibat karhutla.

Pesan SBY Sebelum Tinggalkan Riau

Sebelum meninggalkan Riau, Presiden SBY memberikan instruksi dan arahan pada apel siaga di depan 1.000 personil satuan tugas [satgas] dari berbagai unsur, baik di tingkat pusat dan daerah pada Senin pagi, 17 Maret 2014, di Lanud TNI AU Roesman Nurjadin, Pekanbaru. Presiden SBY menetapkan kebijakan dalam dua tahap yaitu operasi tanggap darurat penanggulangan bencana asap dan penertiban kawasan dan pencegahan bahaya asap.

Pada kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, Presiden SBY menjelaskan untuk mengimplementasikan ke dalam program aksi jangka pendek dan jangka panjang. Program aksi jangka pendek mengacu pada pemadaman api dan

asap, sedangkan jangka panjang menekankan pada tidak ada lagi bencana asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau secara terus menerus.

Pada program aksi jangka pendek, Presiden SBY mengulang kembali instruksi dan arahan sebelumnya dengan pembentukan satgas pemadaman api dan asap, perawatan dan pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum [gakkum]. "Penegakan hukum harus tegas, keras, dan cepat", ucap SBY. Beliau juga menambahkan bahwa penegakan hukum harus menimbulkan efek jera untuk mereka yang menyebabkan bencana kemanusiaan ini. Kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, gangguan transportasi dan perekonomian, penutupan sekolah dan dampak luas lainnya.

Presiden SBY mengingatkan kembali personil TNI dan Polri di satuan wilayah serta di tingkat pusat untuk digerakkan dan dioperasikan di wilayah terdampak.

"Semua harus terjamah dan tuntaskan, padamkan api dan asap", kata SBY. Penuntasan karhutla ini dilakukan dalam operasi terpadu dengan target 3 minggu sejak disampaikan pada 14 Maret 2014. Presiden SBY menginstruksikan satgas-satgas untuk menggunakan semua peralatan dan melakukan semua cara yang patut ditempuh.

Pada tahap kedua atau penertiban kawasan dan pencegahan bahan asap, Presiden SBY menekankan pada pembangunan sistem dan prosedur aksi nyata sehingga bencana asap dapat dicegah. Target tahap ini berlangsung selama 5 bulan, dari April sampai dengan September 2014. Sasaran penertiban kawasan dan pencegahan bencana

antara lain penertiban perkebunan ilegal, penghentian praktik *illegal logging*, dan sistem sekaligus prosedur tetap [protap] aksi nyata di lapangan tentang pencegahan dan tindakan dini apabila ada kebakaran. "Kita harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, banyak masyarakat tidak berdosa ikut menderita. Kita harus lindungi mereka apabila ada kebakaran", jelas Presiden SBY terkait dengan maksud kebijakan ini. Presiden SBY mengimbau semua pihak untuk membersihkan ladang tanpa harus membakar.

Bencana asap ini urusan semua pihak. Presiden SBY juga menekankan pentingnya keterlibatan *corporate social responsibility* [CSR] dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau. Mereka dapat menggunakan peralatan mereka atau membantu penyediaan peralatan untuk memadamkan api.[phi]



Berhasil Tiga Minggu Operasi Pemadaman Api dan Asap Riau



Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] memberikan Satuan Tugas [Satgas] Operasi Terpadu Penanggulangan Bencana Asap tiga minggu untuk memadamkan api dan asap, dimulai dari 14 Maret 2014 hingga 4 April 2014. Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] segera melakukan rapat koordinasi untuk memulai operasi terpadu tersebut. Beberapa indikator menjadi patokan keberhasilan operasi ini, antara lain jumlah titik panas atau *hotspot*, jarak pandang atau *visibility*, kualitas udara yang diukur dengan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara [ISPU], curah hujan, maupun pantauan titik api dan asap dari Sub Satgas Darat. Namun demikian, indikator lain seperti jumlah pasien yang terdampak dan aktivitas dalam penegakan hukum juga sebagai keberhasilan operasi terpadu ini.

Selama Februari 2014 jumlah *hotspot* mencapai 1.272 titik sementara pada Maret 2014 *hotspot* mengalami penurunan. Rekапitupasi *hotspot* hingga 29 Maret 2014 mencapai 1.053 titik. Empat wilayah yang selalu terpantau jumlah *hotspot* yang banyak pada Februari dan Maret tahun ini di wilayah Bengkalis, Pelalawan, Dumai, dan Siak. Wilayah tersebut terindikasi dimanfaatkan untuk perluasan lahan perkebunan baik di wilayah hutan tanaman industri [HTI] maupun wilayah konservasi.

Penurunan jumlah *hotspot* selama Maret 2014 tidak hanya pada keberhasilan operasi Satgas Pemadaman Api dan Asap, tetapi juga operasi penegakan hukum yang dibarengi dengan upaya sosialisasi dan patroli darat. Polda Riau membentuk tim khusus pemburu pembakar hutan dan lahan untuk mencari para pelaku. TNI di tingkat kewilayahan dan teritorial juga meningkatkan patroli pada malam hari mengingat pembakaran dilakukan di waktu ini.

Cuaca Kering Hambat Penurunan Hotspot

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG] cuaca di wilayah Riau terpantau kering 3 hari ke depan, atau sekitar 24 – 27 Maret 2014. Hal tersebut ditekankan kembali oleh BMKG pada saat rapat koordinasi Pos Komando Satuan Tugas Operasi [Satgasops] Terpadu Penanggulangan Bencana Asap Riau di Media Center Lanud Roesman Nurjadin, Pekanbaru, pada Minggu 23 Maret 2014.

Cuaca kering itu dipicu siklon tropis Gillian yang berada di Samudera Hindia, selatan Jawa bagian Barat. Siklon ini mengakibatkan massa udara atau uap air di wilayah Riau tertarik ke arah selatan. Pertumbuhan siklon Gillian ini berawal dari wilayah utara Australia yang bergerak kemudian ke wilayah Nusa Tenggara Timur dan menuju ke arah barat. BMKG menginformasikan bahwa 28 Maret 2014 dan tanggal berikutnya potensi hujan di wilayah Riau kembali turun dengan intensitas ringan hingga lebat.

Kondisi cuaca ini menjadi kewaspadaan Posko Satgas Ops dalam pelaksanaan tugas pemadaman api dan asap. Wakil Komandan Posko Satgas Ops Mayjen TNI Iskandar M. Sahil menegaskan kembali untuk mengoptimalkan Sub Satgas Udara dan Darat untuk melakukan pemadaman. Selama ini pengeboman air atau *water bombing* sangat efektif selain operasi darat dan Teknologi Modifikasi Cuaca [TMC]. Selain memfokuskan untuk pemadaman, satgas juga melaksanakan penegakan hukum [gakkum] dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan pembakaran lahan dan hutan.

Saat itu pada Minggu 23 Maret 2014 citra satelit NOAA 18 masih memantau 12 *hotspot* atau titik panas dengan rincian Indragiri Hilir 3, Bengkalis 3, Dumai 2, Rokan Hilir 1, Meranti 1, Siak 1, Pelalawan 1. Sementara itu kualitas udara sudah membaik di lokasi-lokasi yang terpantau. Namun demikian pemantauan kualitas udara pada jam 16.00 WIB per tanggal 22 Maret 2014 wilayah Bangko masih terpantau 175 PSI atau tidak sehat.

Hujan Efektif kendalikan Hotspot

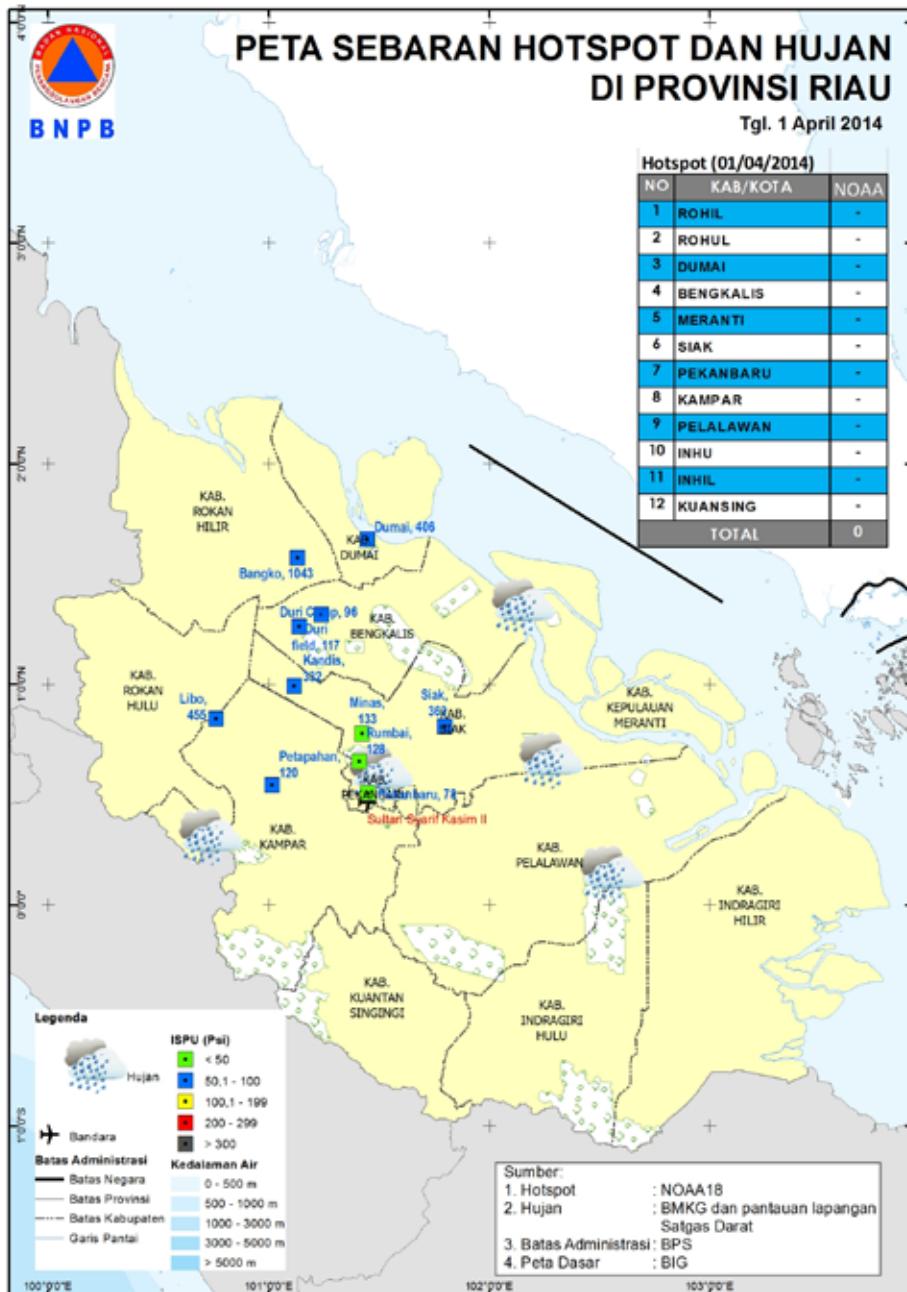
Melihat cuaca yang sempat cenderung kering, Satgas Ops mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan, seperti pemadaman darat dan pengeboman air. Di samping itu, upaya teknologi modifikasi cuaca [TMC] juga terus dilakukan untuk menghujani wilayah-wilayah Riau yang masih terpantau asap dan api hingga saat itu.

TMC yang terus dilakukan membuat hasil. Hujan menguyur semakin sering di lima kabupaten, seperti Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singgingi, dan Bengkalis, pada Minggu 30 Maret 2014. Hujan dinilai sebagai cara paling efektif untuk pemadaman, khususnya di spot yang sulit dijangkau lewat darat maupun pengeboman air atau *water bombing*. Terkadang asap yang tebal justru menghalangi helikopter melakukan operasi *water bombing* tersebut.

Hujan juga sempat turun di Pasir Pangaraian, Bangkinang, Pelalawan, Taluk dan Batang

Cenaku dengan intensitas ringan hingga sedang. Satgas Udara menyemai NaCl sebagai bahan baku TMC dengan total rata-rata 6 ton per hari. Pesawat Hercules dan cassa melakukan masing-masing satu sorti lima dan satu ton. Sementara itu, prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

[BMKG] menginformasikan bahwa prospek cuaca Riau pada tiga hari ke depan [1 – 3 April 2014] berpeluang hujan ringan, terjadi di wilayah barat, tengah dan selatan. Berbagai upaya telah dilakukan, pantauan ISPU pada 30 Maret 2014, jam 16.00 WIB, tercatat sedang di Rumbai dan Petapahan;



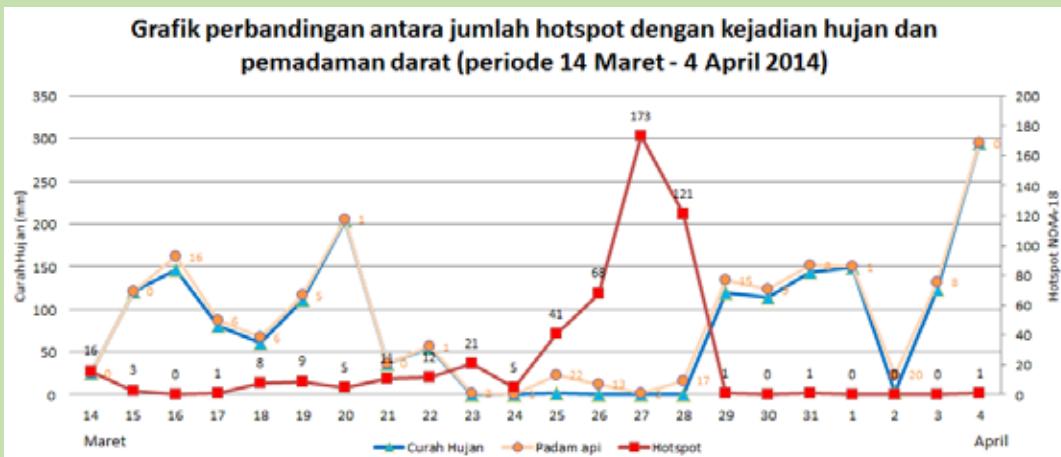
Gambar 1. Peta sebaran hotspot dan curah hujan di wilayah Riau pada 1 April 2014.
Sumber: Pusdatinmas BNPB



tidak sehat di Minas, Duri Camp, Duri Field, Dumai, dan Libo. Kualitas udara dengan kategori berbahaya di Bangko. Namun demikian, Satelit NOAA 18 per jam 16.00 WIB tidak memantau adanya *hotspot* di wilayah Riau. ISPU yang tidak sehat tersebut diakibatkan oleh asap yang masih mengepul

pasca kebakaran dan mungkin juga disebabkan oleh bara yang masih menyala di kedalaman gambut.

Berikut ini grafik yang menggambarkan keterkaitan dengan intensitas curah hujan dengan jumlah *hotspot*.



Gambar 2. Grafik perbandingan antara jumlah *hotspot* dengan kejadian hujan dan pemadaman darat [periode 14 Maret - 4 April 2014].

Sumber: Pusdatinmas BNBP

Seperti dilaporkan BMKG bahwa pada terakhir kondisi cuaca yang kering menyebabkan peningkatan jumlah *hotspot*. Tampak pada grafik tersebut puncak tertinggi *hotspot* pada 27 Maret 2014. Kembalinya curah hujan yang dibantu dengan TMC mampu menurunkan jumlah *hotspot* pada titik paling rendah. Meskipun demikian upaya-upaya pemadaman api dengan *water bombing* dan pemadaman darat terus dilakukan. Ketika api sudah padam, Sub Satgas Darat tetap menyiram bekas-bekas permukaan yang sudah terbakar, air pun terus ditanam hingga menggenangi lahan gambut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif, juga sebagai Komandan Satgas Ops Terpadu, menekankan bahwa operasi bersama ini harus melibatkan semua elemen di tingkat provinsi, kabupaten/kota, TNI, dan Polri serta unsur lain seperti masyarakat dan dunia usaha. BNPB dan unsur pusat akan tetap mendukung penanggulangan bencana di daerah, seperti misalnya dalam sewa pesawat dan dana siap pakai.

Operasi Berhasil dalam Tiga Minggu

Satgas Ops berhasil memenuhi instruksi Presiden SBY dalam pemadaman api dan asap. Operasi dinyatakan selesai pada 4 April 2014. Kemudian Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana [PRC PB] ditarik kembali ke Jakarta. Sehari sebelumnya, mereka mendapatkan pengecekan medis paru-paru dan saluran pernafasan. Para prajurit tersebut telah mengemban tugas di garis depan untuk pemadaman api dan asap.

Namun demikian kesiapsiagaan tetap terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih dalam status pemulihan darurat meskipun pemerintah pusat tetap mendampingi, seperti tetap pengerahan



helikopter dan TMC. Pemerintah daerah tetap dibantu dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni dan relawan.

Beberapa indikator keberhasilan operasi pemadaman api dan asap antara lain ISPU, visibility, *hotspot*. Di samping itu, pantauan Sub Satgas Darat dan Udara harus memastikan tidak adanya asap dan api di wilayah Riau. Laporan Posko Satgas Ops pada tiga hari sebelum jelang batas waktu yang diberikan Presiden SBY menyebutkan bahwa *hotspot* berdasarkan Satelit NOAA18 per jam 17.00 WIB tidak terdeteksi meskipun Sub Satgas Darat memantau satu titik api di Kabupaten Bengkalis. Indikator kualitas udara dilaporkan per jam 16.00 WIB pada kondisi SEHAT di Pekanbaru, Rumbai, dan Minas, SEDANG di Duri Camp, Duri Field, Dumai, Bangko, Libo, Petapahan, Siak, dan Kandis. Tidak ada wilayah dalam kategori TIDAK SEHAT, SANGAT TIDAK SEHAT, DAN BERBAHAYA. Visibility atau Jarak Pandang berdasarkan pantauan BMKG visibility pada jam 16.00 WIB di Pekanbaru 7 km, Pelalawan 5 km, Rengat 7 km, dan Dumai 6 km.

Luas kebakaran lahan dan hutan yang berhasil dipadamkan oleh Sub Satgas Darat dan PRC PB pada 14 Maret 2014 – 1 April 2014 seluas 21.541 ha [74 titik]. Sementara itu, Manggala Agni telah membantu pemadaman 2.942 ha. Keberhasilan ini tidak terlepas dari jerih payah personil TNI dan beberapa kesatuan pemadam api seperti dari Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, Polisi, relawan yang berada di garis depan api. Mereka pun dengan perlengkapan

yang minim mampu bahu membahu untuk memadamkan api dan asap. Berikut rincian jumlah personil yang terlibat dalam Satgas Ops Terpadu terdiri dari BNPB [25 personil], BPBD Provinsi Riau [819], TNI [2.856], Polri [419], BPPT [20], BMKG [10], BBKSDA

Riau [123], BLH Provinsi Riau [10], Dinas Kesehatan Provinsi Riau [75], dan Relawan [574].

Berikut ini upaya yang telah dilakukan oleh Sub Satgas Udara:

Kegiatan	Jenis Pesawat	Keterangan
Recce [survei]	Heli BNPB dan 2 heli [Sinar Mas dan RAPP].	Per tanggal 31 Maret 2014, tambahan 1 heli jenis Bell dan 2 Bolco milik Polri membantu untuk survei dan pergerakan pasukan dan perlengkapan.
Water Bombing (WB)	Bolco, Kamov, dan Sikorsky	Periode 14 Maret 2014 – 1 April 2014, 3 heli jenis Sikorsky, Kamov, dan Bolco melakukan WB dengan total 3.966 sorti. Kapasitas WB dalam 1 sorti Sikorsky 3.600 liter, Kamov 4.000, dan Bolco 500
Teknologi Modifikasi Cuaca(TMC)	Hercules dan Cassa	Periode 14 Maret 2014 – 1 April 2014, total 48 sorti dengan bahan semai [NaCl] 116,9 ton.

Sejak dilakukan operasi terpadu, *hotspot* cenderung fluktuatif karena kondisi cuaca kering dan indikasi pembakaran karhutla secara sengaja. Namun setelah dilakukan operasi pemadaman api dan asap secara intensif, *hotspot* kembali turun drastis hingga pada titik nol pada 1 April 2014. Penegakan hukum, sosialisasi, dan patroli sangat mendukung untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan lain bahwa umlah pasien dampak bencana asap berkurang dan tidak ada yang rawat jalan dan inap. Dinas Kesehatan Provinsi Riau melakukan pelayanan di beberapa Pos Kesehatan dan Bhakti Sosial bekerja sama dengan Sinar Mas, Eka Hospital, dan Tim Medis Universitas Riau. Pelayanan kesehatan dilakukan di Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hilir pada 20 – 31 Maret 2014. Total pasien yang dilayani mencapai 2.751 orang. Laporan per 1 April 2014 penyakit ISPA berjumlah 316 pasien, pneumonia 8, asma 26, mata 4, kulit 23 dan tidak ada pasien yang rujukan dan rawat inap. Aktivitas masyarakat kembali normal seperti kegiatan sekolah dan beroperasinya bandara Pekanbaru.

Sementara itu, proses penegakan hukum masih berjalan dan 18 perkara sudah ada tahap P21. Laporan polisi masih dapat terus bertambah. Pihak Kepolisian melakukan penyidikan kasus karhutla sampai dengan 1 April 2014 dengan rincian 66 laporan polisi, 109 tersangka [termasuk 1 korporasi], 7 DPO. Proses penyelesaian 27 perkara tahap sidik, 21 tahap I, 18 tahap P21. Mereka juga membentuk Tim Pemburu Pembakar Hutan dan Lahan, Tim Sosialisasi, dan Tim Patroli, bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Kehutanan [Kemenhut] melakukan inventarisasi dan penyidikan kasus karhutla. Kemenhut mengirimkan saksi ahli terkait dengan penegakan hukum. Upaya pihak kepolisian juga telah membentuk Tim Gabungan terdiri dari Kemenhut, Dinas Perkebunan, Sub Satgas Darat, Polisi untuk pemetaan area yang terbakar.

Beberapa fakta dari kejadian karhutla 2014 ini, Kepala BNPB menyebutkan bahwa kerugian hingga mencapai Rp 15 triliun, cagar biosfer terbakar 2.398 ha, lahan terbakar 21.914 ha, sekitar 58.000 orang terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas [ISPA] dan penyakit lainnya, sekolah diliburkan 1 minggu, dan biaya pengendalian hingga lebih Rp. 150 miliar.[phi]

Ancaman Asap Riau Masih di Depan Mata

Bencana asap yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan peringatan bagi pemerintah daerah setempat untuk bersiaga penuh menghadapi ancaman berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan [karhutla] tetap menjadi ancaman di wilayah Riau pada Mei hingga September tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [BMKG] menginformasikan bahwa Juni merupakan puncak kemarau di wilayah Riau, seperti Pekanbaru, Siak bagian barat, Pelalawan bagian barat dan Indragiri Hulu. BMKG juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca pada periode Mei sampai dengan September nanti cenderung terjadi El Nino lemah. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di wilayah Riau akan lebih sedikit dibanding pola normalnya sehingga potensi karhutla besar. Selain itu pada bulan Juni sampai dengan September, pola angin dari selatan hingga barat daya yang mengarah ke negara tetangga Malaysia dan Singapura dapat memicu potensi tersebut.

Pada pertengahan Maret lalu, pantuan BMKG dengan *Fire Danger Rating System* [FDRS] menunjukkan bahwa potensi kemudahan terjadinya kebakaran masih terjadi pada penghujung Maret ini di

wilayah Bengkalis dan Siak. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bintang Susmanto menekankan penguatan kapasitas dinas terkait di daerah dengan dibantu unsur TNI and Polri di semua lini. "Jadi apabila

militernya bergerak, sipilnya juga bergerak", demikian ucapan Bintang pada rapat koordinasi Posko Satgas Ops Terpadu Penanggulangan Bencana Asap, di Lanud Roesman Nurjadin pada 27 Maret 2014 lalu.

Dampak karhutla awal tahun hingga saat ini telah berdampak pada terbakarnya hutan dan lahan serta kesehatan masyarakat. Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPP Tri Budiart pada Seminar Nasional Riau Bebas Asap pada April lalu menyebutkan beberapa catatan terkait karhutla Riau. Karhutla menimbulkan kerugian besar pada segi lingkungan, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, hubungan antar negara dan citra Indonesia di mata dunia.

Kebakaran lahan dan hutan 99% disebabkan kesengajaan manusia sehingga perlu penanganan yang serius dan berlanjut. Kebakaran kali ini mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 15 trilyun, seluas 2.398 ha cagar biosfer terbakar, 21.914 ha lahan terbakar, 58.000 orang terserang ISPA, sekolah diliburkan lebih dari 1 minggu dan biaya pengendalian lebih dari Rp. 150 miliar.

Penguatan dan Upaya di Tingkat Lokal

Begitu luas kerugian dan dampak luas, penanggulangan bencana asap harus dilakukan secara serius. Mengantisipasi cuaca kering Mei hingga September, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan persiapan untuk pencegahan karhutla. Selama ini pemerintah setempat telah memanfaatkan data dan informasi dari BMKG sebagai

peringatan dini. Pemerintah Provinsi yang didukung oleh Satuan Tugas Operasi Terpadu Penanggulangan Bencana Asap telah melakukan sosialisasi terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Dinas terkait dengan TNI/Polri melakukan sosialisasi di beberapa wilayah yang lahan dan hutannya banyak terbakar.

Gubernur Riau juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembuatan Bak Penampung Air dan Embung di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Instruksi tersebut ditujukan untuk Bupati di wilayah Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Di samping untuk wilayah tersebut, instruksi ini ditujukan juga ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam [BBKSDA] dan para direktur perusahaan perkebunan. Sementara itu Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kantor Wilayah Riau merekomendasikan untuk wilayah Kampar, Kuantan Senggingi, Rokah Hulu dan Indragiri Hulu juga mengimplementasikan instruksi Gubernur ini.

Air yang ditampung di bak penampungan dan embung sangat bermanfaat khususnya pemadaman di lahan atau hutan yang letaknya sulit diakses dan atau spot yang di sekitarnya tidak terdapat sumber air. Gubernur menginstruksikan untuk BBKSDA untuk membuat



sebanyak satu embung di wilayah Taman Nasional [TN] Teso Nilo, lokasi Sungai Nilo Kabupaten Pelalawan, Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling, lokasi Sungai Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan TN Bukit Tiga Puluh, lokasi Sungai Cenaku Kecil, Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, perusahaan perkebunan diwajibkan untuk membuat 4 embung per 50 ha, sedangkan pemilik lahan seluas 2 ha



diwajibkan untuk membuat 1 sumur dengan kedalaman mencapai mata air.

Pemerintah Provinsi memberi batas waktu hingga akhir Maret 2014 untuk penyelesaian embung tersebut. Pemerintah mencatat 40 perusahaan perkebunan yang diwajibkan untuk memenuhi instruksi Gubernur tersebut. Langkah lain pencegahan dan kesiapsiagaan

menghadapi karhutla, Pemerintah Riau meminta kawasan hutan dan lahan yang mudah terbakar di dekat sungai dibuat saluran untuk aliran air. Penguatan peralatan dan perlengkapan pemadaman api dan asap dituntut untuk ditingkatkan terhadap perusahaan perkebunan maupun koperasi perkebunan untuk antisipasi penyebaran kebakaran lahan dan hutan.

Sesuai dengan instruksi Presiden RI tentang penyusunan prosedur tetap [protap], Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Provinsi Riau dan dinas-dinas terkait serta dukungan Satgas Ops Terpadu Penanggulangan Bencana Asap telah menyusun Protap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif memberikan masukan terhadap protap yang sedang disusun tersebut. Menurut beliau protap sudah mendekati sempurna dan perlu penekanan konkret pada beberapa bagian protap. Syamsul mengatakan bahwa pengorganisasian, pengelolaan dana, dan payung hukum sangat penting sebagai bagian sistem dalam protap itu. "Tidak hanya pemerintah saja, tetapi komponen masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api [MPA] yang ada di sini, dan *corporate social responsibility* [CSR] dari dunia usaha sangat penting dalam pengorganisasian penanggulangan karhutla", demikian ujar Syamsul Maarif yang juga selaku Komandan Satuan Tugas Operasi Terpadu.

Maksud dari penyusunan protap tersebut untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan mekanisme prosedur tetap pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Protap ini akan menjadi pedoman dalam pengendalian bencana asap sehingga diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak. Syamsul Maarif mendesak bahwa protap harus ada endorsement dari pemerintah daerah setempat. Ini mampu mengerakkan berbagai sehingga ancaman bencana

dapat dicegah atau pun dapat ditangani dengan baik.

Dilihat dari penguatan kelembagaan, saat ini masih ada empat kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki BPBD. Asisten I Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan BPBD segera dibentuk di empat kabupaten tadi. Tidak hanya itu, Pemerintah provinsi mengajak seluruh komponen hingga tingkat kepala desa untuk mengucapkan ikrar.

Antisipasi Ancaman sebagai Refleksi Dampak Bencana Asap yang Menggerikan

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sangat beralasan. Selain kerugian materiil yang begitu besar, bencana asap ini ternyata memberikan dampak yang sangat menggerikan. Mungkin di saat menghirup udara yang bercampur dengan asap, masyarakat tidak langsung merasakan perubahan di dalam dirinya. Namun demikian berdasarkan penelitian medis, bencana asap sangat berdampak terhadap kesehatan manusia.

Udara yang kita hirup adalah kehidupan. Ketika udara telah asap, udara akan memberikan dampak kesehatan yang besar. Zulharman dan Anami [2014] dalam artikelnya di buku Jerebu di Negeri Kami menyebutkan bahwa kabut asap mengandung berbagai polutan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit khususnya di

saluran napas, seperti infeksi saluran napas akut hingga kanker paru walaupun sistem pernapasan manusia sudah dilengkapi dengan berbagai mekanisme pertahanan.

Dampak yang lebih menggerikan lagi, mereka menyebutkan bahwa kabut asap yang mengandung bahan polutan seperti particulat matter [PM], karbon monoksida [CO], nitrogen dioksida [NO₂], sulfur dioksida [SO₂], dan Ozone [O₃] dapat memicu kematian bayu dan janin. Bahan dengan kadar Ozone yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pernafasan, memicu asma, menurunkan fungsi paru, dan pada akhirnya terjangkit penyakit paru. Mereka menambahkan bahwa menghirup udara tercemar nitrogen dioksida dalam waktu yang panjang menyebabkan timbulnya gejala bronchitis pada anak penderita asma, sedangkan sulfur dioksida [SO₂] menyebabkan iritasi pada mata, peradangan pada saluran napas, penyakit jantung, memperberat asma, dan mempermudah terkena infeksi saluran nafas.

Oleh karena itu, aksi nyata dan gerakan bersama untuk mengantisipasi ancaman menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan Riau bebas asap. Hal tersebut tidak hanya menyelamatkan masyarakat Riau saat ini tetapi juga generasi penerus yang akan membangun kejayaan provinsi ini.[phi]

Gerakan Bersama untuk Solusi Tuntas **Riau Bebas Asap**

Provinsi Riau masih memiliki ancaman kebakaran hutan dan lahan [karhutla] yang tinggi. Hal tersebut berdasarkan prediksi cuaca yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG]. Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] sejak dini telah mengingatkan dan mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bentuk antisipasi karhutla. BNPB dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat Tri Budiarto telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [BMKG], Badan Pertanahan Nasional, TNI, Polri serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota pada 28 April 2014 lalu di Kantor Gubernur Riau.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau Wan Amir Firdaus tidak hanya memberikan kesempatan untuk tanya jawab antara BNPB dan unsur-unsur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi sekaligus arahan BNPB dalam mengantisipasi kemarau panjang pada Mei hingga September nanti.

Tri Budiarto menekankan bahwa pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan provinsi hendaknya jangan menunggu dan berharap asap membesar baru bertindak. "Kami mengimbau untuk melakukan upaya-upaya sejak awal agar api dan asap tidak terjadi di kabupaten/kota masing-masing", tambah Deputi BNPB.

Beliau juga menambahkan bahwa meniadakan asap dan potensi asap jauh lebih penting daripada memadamkan api

yang sudah terlanjur besar dan menyebar. Pemerintah daerah setempat masih memiliki waktu 20 hari sebagai bentuk persiapan mengantisipasi bencana asap ke depan. Koordinasi antar dinas dan badan yang ada di setiap kabupaten/kota sangat penting untuk bersinergi sejak dini. Di samping itu, keterlibatan TNI dan Polri serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai bentuk tanggung jawab bersama menghadapi bencana ini.

Rencana Aksi Langkah Konkret Antisipasi Bencana Asap

Masih dalam arahan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, beberapa langkah yang sudah seharusnya dilakukan oleh masing-masing kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah perhitungan anggaran dan kebutuhan, penyusunan rencana kontijensi, rencana aksi yang melibatkan semua komponen di wilayah masing-masing.

BNPB mendorong pemerintah daerah setempat menyusun rencana aksi atau rencana operasi dengan rencana kontijensi. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden dalam penanggulangan bencana, bahwa responder utama adalah kabupaten/kota dan provinsi memberikan penguatan serta merapat apabila kabupaten/kota membutuhkan bantuan, sedangkan nasional akan memberi pendampingan apabila provinsi tidak mampu. Masing-masing kepala daerah harus menjadi pengendali operasi sebagai penguasa kabupaten/kota.

Dalam status tanggap darurat, bupati/walikota diberi kewenangan untuk menunjuk komandan tanggap darurat atau *incident commander* [IC], contohnya pemimpin operasi sejak 20 Mei hingga 30 Agustus. Prinsip IC adalah siapa pun yang memiliki kapasitas dan kapabilitas baik, kepemimpinan dan mampu mengambil keputusan di saat krisis hingga bertindak cepat. Selanjutnya pemerintah provinsi dapat memfasilitasi kabupaten/kota untuk membuat langkah-langkah pembentukan pos komando [posko].

Terkait dengan sistem posko, Tri Budiarto melihat pentingnya pendirian tiga posko. Pertama Posko Induk Tanggap Darurat di Base Ops Lanud Roesman Nurjadin Pekanbaru [jika kebakaran terjadi di Pelalawan, Siak, dan Kampar], kemudian Posko Lapangan I di Bandar Udara Pinang Kampai-Kota Dumai [jika kebakaran terjadi di Dumai, Bengkalis, Meranti, Rokan Hilir dan Perbatasan Rokan Hulu], dan terakhir Posko Lapangan II di Bandar Udara Japura, Rengat-Indragiri Hulu [jika kebakaran terjadi di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuansing]. Dengan pertimbangan bahwa areal kebakaran hutan dan lahan lebih dekat secara operasionalnya dari Kota Dumai, dimana Dumai memiliki bandar udara dan dekat dengan laut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai titik sumber air dalam melakukan *water bombing*.

Di samping itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB mengingatkan kembali bahwa dua bulan lalu para bupati, walikota,

camat hingga kepala desa berkumpul dan menyepakati deklarasi penanggulangan asap. Komitmen tersebut harus konkret dalam mengantisipasi ancaman ke depan. Menurut beliau, deklarasi tersebut harus diwujudkan juga dengan penyusunan rencana aksi atau operasi.

Pada 4 April 2014 lalu, di hadapan para personil yang melakukan pemadaman api, Kepala BNPB Syamsul Maarif secara tegas menyerahkan tongkat penanggulangan bencana asap kepada Gubernur Riau. Dalam arahan Kepala BNPB mengingatkan kembali bahwa pemerintah provinsi masih memiliki cukup waktu, terhitung 20 hari sejak tanggal tersebut.

Rencana aksi tersebut merupakan kepentingan gubernur, bupati, dan walikota karena rencana aksi berbicara tentang kekuatan suatu daerah, kebutuhan daerah, siapa melakukan apa, menggambarkan tentang durasi operasi, kebutuhan sumber daya manusia dari berbagai SKPD, kekuatan dan kekurangan daerah.

Selanjutnya patut ada mekanisme terkait pelaporan, *monitoring*, dan *controlling* yang terstruktur rapi sehingga dengan demikian, struktur dan fungsi instansi akan menjadi jelas. Peran provinsi sebagai pihak yang melakukan



pendampingan akan menjadi muncul. Pada akhir rapat koordinasi disepakati bahwa rancangan rencana aksi di tingkat kabupaten/kota sudah selesai pada 5 Mei 2014 dan finalisasi rancangan tersebut pada 10 Mei 2014 nanti.

Seminar Nasional Solusi Tuntas Riau Bebas Asap

Beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] berpesan bahwa bencana asap di Provinsi Riau jangan sampai berulang. Kebakaran hutan dan lahan [karhutla] menimbulkan dampak yang besar dari segi lingkungan, pendidikan, politik, ekonomi,

kesehatan, hubungan antar negara dan citra Indonesia di mata dunia. Karhutla 99% disebabkan oleh ulah manusia sehingga perlu penanganan yang serius dan kontinyu. Presiden SBY menegaskan dengan keras bahwa pembakaran hutan dan lahan ini sebagai kejahanatan kemanusiaan.

Upaya-upaya pemerintah pusat telah dilakukan dengan memobilisasi sumber daya nasional untuk penanggulangan bencana asap di Provinsi Riau. Presiden RI memberikan waktu dari 14 Maret hingga 4 April 2014 untuk melakukan pemadaman api dan asap dengan membentuk Satuan Tugas Operasi Terpadu yang melibatkan



“ Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak yang besar dari segi lingkungan, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, hubungan antar negara dan citra Indonesia di mata dunia.

kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan unsur-unsur terkait di daerah. Operasi ini berhasil memadamkan api dan asap dan pada 4 April 2014 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif menyerahkan tugas penanggulangan bencana asap kepada Gubernur Riau Annas Maamun.

Namun demikian, tugas penanggulangan bencana asap belum berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [BMKG] memprediksi bahwa kondisi cuaca pada periode Mei sampai dengan September nanti cenderung terjadi El Nino lemah. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di wilayah Riau akan lebih sedikit dibanding pola normalnya sehingga potensi karhutla besar. Selain itu pada bulan Juni sampai dengan September, pola angin dari selatan hingga barat daya yang mengarah ke negara tetangga Malaysia dan Singapura dapat memicu potensi tersebut.

Latar belakang tersebut mendorong BNPB bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau, Universitas Riau [UR] dan Universitas Gadjah Mada [UGM] menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Solusi Tuntas Riau Bebas Asap" pada 29 – 30 April 2014 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Terkait dengan peran univeristas, UR merupakan mitra strategis dan telah berperan aktif dalam menemukan solusi tuntas dan melakukan tindakan konkret di lapangan. UR sendiri telah membentuk Satuan Tugas Solusi Tuntas Bencana Asap [STBA] untuk menyusun strategi berbasis penelitian, partisipasi masyarakat, dan implementasi berupa kegiatan yang terprogram.

Pada satu sisi, seminar nasional yang dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau Wan Amir Firdaus merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden SBY. Di sisi lain, seminar bertujuan untuk memobilisasi masyarakat baik dari kalangan akademisi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk turut aktif dalam menyelesaikan secara tuntas masalah bencana asap di Riau.

BNPB, UR, dan UGM mengharapkan bahwa seminar ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman tentang akar permasalahan kebakaran lahan dan hutan dari berbagai perspektif dari pemerintah, pakar, dunia usaha dan masyarakat, tetapi juga mendiskusikan melalui Forum Diskusi Kelompok Terpadu finalisasi payung hukum berupa Instruksi Presiden [Inpres] tentang Penanggulangan Bencana Asap Secara Tuntas di Ekosistem Rawa Gambut. Inpres tersebut dimaksudkan untuk memberi arahan kepada seluruh pemangku kepentingan agar melakukan tindakan yang terarah dan jelas dalam penanggulangan bencana asap.

Dengan Inpres ini diharapkan koordinasi pada kondisi darurat antar pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga bencana asap dapat ditangani secara cepat dan tepat, serta tidak terjadi berulang lagi.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber kunci seperti dari pejabat pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, lebih 200 peserta hadir seperti dari pemerintah pusat dan daerah, universitas, pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan, media, LSM, dan lain sebagainya. Pada pembukaan seminar nasional tersebut juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara BNPB dan UR, peresmian Pusat Studi Bencana [PSB] Universitas Riau, dan peluncuran Buku "Jerebu di Negeri Kami".[phi]



Kabupaten Blitar dalam Erupsi Kelud

Wilayah Blitar dapat dibagi menjadi dua yaitu bagian utara dan selatan. Wilayah yang berada di Kabupaten Blitar bagian selatan memiliki karakteristik yang kurang subur, sementara itu di wilayah bagian utara memiliki karakteristik tanah yang subur. Salah satu pendukung kesuburan tanah yang berada di wilayah Utara ini adalah keberadaan Gunung Kelud yang masih aktif. Di samping itu didukung dengan adanya aliran sungai yang jumlahnya relatif banyak. Di Kabupaten Blitar paling tidak terdapat sekitar 32 aliran sungai yang menjadi penopang semakin suburnya areal pertanahan. Namun, di samping kesuburan ini wilayah Blitar memiliki daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa tempat.

Awal tahun 2014 ini Gunung Kelud menunjukkan tanda-tanda peningkatan kegempaan dan pada tanggal 13 Februari 2014 mengalami erupsi. Daerah Blitar yang dalam sejarah letusan Gunung Kelud selalu terdampak sangat parah, sehingga sebelum letusan 2014 ini terjadi beberapa upaya mitigasi kesiapsiagaan telah dilakukan untuk meminimalkan jumlah korban dan kerusakan.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dalam menghadapi letusan Gunung Kelud diantara adalah gladi posko di setiap koramil. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan telah dilakukan dengan melakukan gladi/pelatihan simulasi bencana penanggulangan letusan Kelud. Gladi ini melibatkan aparat sipil dan militer seluruh kabupaten Blitar, dengan kegiatannya adalah simulasi pembuatan MCK di pengungsian, pendidikan dan latihan [Diklat SAR], rapat pembentukan Klaster PB, serta Penyiapan tenda lapangan. Penyuluhan juga dilakukan kepada masyarakat mengenai status Gunung Kelud, sosialisasi tempat dan jalur evakuasi dan rambu-rambu tanda evakuasi. Pemkab Blitar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Kabupaten Blitar dan Lembaga Penelitian Universitas Jember

telah menyusun rencana kontingen yang dituangkan dalam dokumen "Prosedur Tetap [Protap] Tanggap Darurat Bencana Gunung Kelud Kabupaten Blitar" pada Oktober 2013 yang tujuannya adalah untuk:

- Menghimpun kekuatan yang tersedia di tingkat kabupaten hingga kecamatan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Gunung Kelud.
- Mempersingkat waktu tanggap khususnya pada masa krisis yang memiliki waktu relatif singkat.
- Mengurangi dampak negatif akibat bencana yang timbul secara cepat, tepat, efektif, dan efisien dengan mengutamakan sumberdaya lokal.

Komunikasi yang efektif juga dibangun agar informasi dari pusat langsung bisa sampai kepada masyarakat, Salah satunya adalah seperti yang terlihat dari terbentuknya jaringan komunikasi radio HT di Kecamatan Gandusari yang diberi nama BBS Mitra [Babinsa Mitra]. Sebuah komunitas amatir radio yang dikepalai oleh Danramil Gandusari dan terdiri dari para Babinsa [Bintara Pembina Desa] beserta komponen masyarakat terkait. Pemerintah Kabupaten Blitar juga mempersiapkan tempat evakuasi di 4 kecamatan yang diprediksi menjadi daerah terdampak erupsi sebagai berikut:

Beberapa kerawanan dan ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Blitar adalah:

Banjir	Daerah yang rawan meliputi Kecamatan Sutojayan, Wonodadi, Kademangan, dan Udanawu
Tanah Longsor	Daerah yang rawan meliputi Kecamatan Doko, Gandusari, Wlingi, Wonotirto, Bakung dan Panggungrejo
Kekeringan	Daerah yang rawan meliputi Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Bakung, dan Kademangan
Puting Beliung	Daerah yang rawan meliputi Kecamatan Panggungrejo, Ponggok, Srengat, dan Nglegok
Tsunami	Daerah pesisir pantai sangat potensial terjadi tsunami di wilayah Kabupaten Blitar
Gunung Meletus	Daerah yang rawan meliputi seluruh wilayah Kab. Blitar, baik akibat dampak langsung maupun dampak tidak langsung.

- 1 Kecamatan Nglegok : 24 tempat evakuasi, daya tampung 29.100 jiwa
- 2 Kecamatan Gandusari : 12 tempat evakuasi, daya tampung 10.028 jiwa
- 3 Kecamatan Garum : 15 tempat evakuasi, daya tampung 6.700 jiwa
- 4 Kecamatan Ponggok : 12 tempat evakuasi, daya tampung 7.700 jiwa

Untuk menunjang aktivitas di tempat-tempat evakuasi tadi juga telah berhasil dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut:

Kendaraan angkutan	115 unit truk/pick up
Ambulans	24 unit
Tandu	48 unit
Generator	20 unit
Tenda [regu dan peleton]	60 unit
Tikar, matras, terpal	500 unit
Selimut	1.500 lembar
Alat-alat Dapur Umum	8 set
Tandon air	10 unit
Paket obat-obatan	6.000 paket
Masker	35.000 buah
MCK portabel	40 unit
Truk tangki air	5 unit

Semua ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak erupsi Kelud dan mengurangi dampak kerusakan serta korban yang mungkin berjatuhan. Sebelum Kelud erupsi, telah dilakukan pemasangan tanda-tanda dan jalur evakuasi ditempat yan startegis agar masyarakat mengerti kemana mereka harus mengungsi.

Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 188/60/409.012/KPTS/2014 tentang Penetapan Status Keadaan Komando Tanggap Darurat dan Perpu Siaga Darurat Bencana Nomor : 188/59/409.012/KPTS/2014. Kegiatan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dimulai pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB yaitu pada saat terjadi erupsi atau setelah sekitar 1 jam 35 menit setelah ditetapkan status Gunung Kelud dari Siaga menjadi Awas. pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 16.00 WIB, Bupati Blitar telah memerintahkan pelaksanaan evakuasi kepada warga berdampak [radius 10 km dari Puncak Gunung Kelud] di empat kecamatan yaitu Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Ponggok.

Wilayah terdampak letusan Gunung Kelud di Kabupaten Blitar sebanyak tiga kecamatan yaitu tiga desa di kecamatan Ponggok, empat desa di Kecamatan Nglegok, tiga desa di Kecamatan Garum dan tujuh desa di Kecamatan Gandusari.

Terdapat 16 desa yang terdampak secara langsung dalam radius 5-10 km dari puncak

Tabel 2
Lokasi Cakupan Bencana Gunung Kelud di Kabupaten Blitar

No	Radius	Kecamatan	Desa
1	5 s/d 10 km	Nglegok	4 Desa
2	5 s/d 10 km	Gandusari	7 Desa
3	5 s/d 6 km	Garum	3 Desa
4	5 s/d 6 km	Ponggok	2 Desa
	Jumlah	4 Kecamatan	16 Desa

Sumber : Laporan Tanggap Darurat 2014, BPBD Kabupaten Blitar

gunung Kelud. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh BPS, 16 desa terdampak yang berada di 4 [empat] kecamatan di Kabupaten Blitar dihuni oleh lebih dari 115 ribu penduduk. Warga mengungsi ditempat yang telah ditentukan sebelumnya yang tersebar di 63 titik evakuasi yang telah disepakati. Jumlah pengungsi di 63 lokasi pengungsian pada saat erupsi Gunung Kelud tersebar di 4 [empat] kecamatan mencapai 32.846 jiwa.

TNI dalam hal ini Kodim dan Polres memberikan bantuan mobil truck yang telah disediakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan apabila terjadi letusan Gunung Kelud, dan dibantu dengan mobil truck yang dimiliki oleh warga setempat, sehingga memudahkan proses evakuasi saat terjadi letusan Gunung Kelud. Untuk kebutuhan makan selama 1 x 24 jam swadaya masyarakat yang meliputi

kelurahan setempat dan camat setempat bergotong-royong untuk menyediakan pangan untuk kebutuhan pengungsi dan ini dilakukan secara spontan. BPBD dan PMI bekerjasama memberikan sarana air bersih di tempat pengungsian pada saat tanggap darurat bencana dan pasca tanggap darurat. Hal ini terbukti dengan adanya mobil keliling berupa tanki air yang berkeliling secara bergiliran di wilayah kelurahan dan kampung kampung yang terdampak bencana Kelud.

Dampak dari letusan ini pada wilayah Kabupaten Blitar menyebabkan rumah rusak sebanyak 104 unit di Desa Sumbersari, 70 unit di kampung Bledak dan 18 unit di Kampung Kali Kuning Desa Penataran dan 1 unit di Desa Bacem, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sarana serta fasilitas umum yang rusak selain rumah adalah balai umum, fasilitas

Tabel 3
Kerusakan Prasarana dan Sarana

Desa/Lokasi 1	Sasaran 2	Jumlah 3	Satuan 4
a. Kampung Anyar	Rumah	104	Unit
Desa Sumber Sari	Balai Umum	1	Unit
	Gereja (GPGI)	1	Unit
	Gereja (GKIW)	1	Unit
	Masjid	1	Unit
	SD	1	Unit
	TK	1	Unit
b. Desa Penataran			
Kampung Bledak	Rumah	70	Unit
	Kantor Perkebunan	1	Unit
	Musholla	1	Unit
Kampung Kali Kuning	Rumah	18	Unit
	Gereja	1	Unit
	Kantor	1	Unit
	Musholla	1	Unit
Desa Bacem	Rumah	1	Unit

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar

peribadatan dan fasilitas pendidikan. Fasilitas peribadatan yang rusak terjadi di dua desa dengan rincian 3 unit di Desa Sumbersari dan 2 unit di Desa Penataran. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan 2 unit di desa Sumbersari dan untuk fasilitas lainnya berupa dua unit kantor perkebunan di Desa Penataran.

Sarana dan prasarana untuk penyelamatan penduduk sudah memadai semua, namun masih terdapat beberapa kampung di Kecamatan Gandusari yaitu Kampung Aceh Bawah dan Kampung Aceh Atas, cukup mengalami kesulitan yang berarti karena akses jalan sangat terbatas, terbukti saat turun hujan jalan akses yang menghubungkan akses Kampung Aceh Bawah dan Kampung Aceh Atas terputus

dikarenakan pasca bencana letusan Gunung Kelud, mengalirnya lahar dingin di sungai yang menghubungkan Kampung Aceh Bawah dan Kampung Aceh Atas. Kampung Aceh Atas merupakan kampung yang lokasinya kurang lebih 5 km dari kawah, dan tentu ini sangat berbahaya jika terjadi lagi lentusan Gunung Kelud di kemudian hari.

Secara kelembagaan, pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan khususnya antar instansi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Kabupaten Blitar

Beberapa hal yang dipersiapkan dalam proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat

- 1 Wakil Bupati Kabupaten Blitar sebagai IC penanganan bencana.
- 2 Atas rekomendasi dari PVMBG tentang kondisi Gunung Kelud yang semakin meningkat dan berbahaya, masyarakat mulai diungsikan sebelum terjadi letusan sebanyak 28.790 jiwa.
- 3 Evakuasi masyarakat didahului oleh kelompok rentan [orang tua dan balita], mereka diungsikan sehari sebelum gunung meletus, dan ketika status menjadi AWAS, tersisa masyarakat yang berusia produktif dan semua diungsikan sampai akhirnya terjadi letusan.
- 4 Warga mengungsi ditempat yang telah ditentukan sebelumnya yang tersebar di 63 titik evakuasi yang telah disepakati.
- 5 Jumlah pengungsi di 63 lokasi pengungsian pada saat erupsi Gunung Kelud tersebar di 4 kecamatan mencapai 32.846 jiwa.
- 6 Jumlah pengungsi pasca erupsi tanggal 14 Februari 2014 pukul 09.00 menurun menjadi 2.083 jiwa, karena sebagian warga terdampak dari Kecamatan Ponggok kembali ke rumah serta sebagian warga terdampak di 3 kecamatan lain kembali ke rumah.
- 7 Terjadi peningkatan jumlah warga di pengungsian pada tanggal 14 Februari pukul 20.00 dikarenakan adanya isu bahwa akan terjadi letusan susulan Gunung Kelud, sehingga total jumlah pengungsi pasca erupsi mencapai 12.330 jiwa.
- 8 Pasca erupsi tanggal 15 Februari 2014, pukul 09.00 WIB, jumlah warga di pengungsian sebanyak 2.070 jiwa.
- 9 Tanggal 20 Februari 2014, dilakukan pemulangan keseluruhan pengungsi ke desa masing-masing.

Klaster-klaster yang telah dibagi untuk beberapa SKPD terkait yang membantu dalam penanganan bencana di lapangan

- 1 Klaster Manajemen Koordinasi terdiri dari; Kepala Bakesbangpol Kab. Blitar, Kodim 0808 Blitar, Polres Blitar Kota, Polres Blitar, Batalyon 511, Satpol PP Kab. Blitar, Asisten sekretaris Daerah, Staf ahli, BAPPEDA, BPKAD, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD.

Klaster-klaster yang telah dibagi untuk beberapa SKPD terkait yang membantu dalam penanganan bencana di lapangan

- 2 Klaster Ketertiban dan Keamanan wilayah Polres Blitar Kota terdiri dari Polres Blitar Kota, Kodim 0808 Blitar, Satpol PP Kab. Blitar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Camat calon desa berdampak [Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok], Seksi Kesiapsiagaan BPBD.
- 3 Klaster Ketertiban dan keamanan Wilayah Polres Blitar terdiri dari Polres Blitar, KODIM 0808 Blitar, Satpol PP Kab. Blitar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Camat calon desa berdampak [Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok], dan Seksi Kesiapsiagaan BPBD.
- 4 Klaster Sistem Informasi, Komunikasi dan Humas terdiri dari bagian Humas dan Protokol Kab. Blitar, BPBD Kabupaten Blitar, BPBD Propinsi Jawa Timur, PVMBG Pos Pengamatan G. Kelud, ORARI, RAPI, dan Radio – radio swasta.
- 5 Klaster Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi [PPE/SAR] terdiri dari KODIM 0808 Blitar, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Batalyon 511, BASARNAS, PMI, ORARI, RAPI, Pramuka, Camat calon desa berdampak [Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok], Relawan lain, dan Seksi Pencegahan BPBD.
- 6 Klaster Kesehatan terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Rumah sakit swasta, Tenaga medis TNI, PMI, Pramuka saka bhakti husada, Relawan kesehatan, Subbag keuangan BPBD.
- 7 Klaster Pemenuhan dasar terdiri dari Dinas Sosial, Batalyon 511, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Ngudi Waluyo, PDAM, PLN, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Disperindag Tamben, Bagian Ekonomi, Camat calon desa berdampak [Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok], PMI, Pramuka, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD.
- 8 Klaster Perbaikan Pemulihan Sarana dan Prasarana Fasilitas Vital, terdiri dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, PLN, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, KODIM 0808 Blitar, Polres Blitar Kota, Polres Blitar, Bagian Pembangunan, Pihak swasta/rekanan, Seksri Rehabilitasi BPBD.
- 9 Klaster Transportasi, terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, KODIM 0808 Blitar, Satpol PP, Bagian Umum dan Perlengkapan, Kasi Kedaruratan BPBD.
- 10 Klaster Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Inspektorat. Dinas Sosial, BPKAD, BKD, PMI, Pramuka, Kementerian Agama / Tokoh masyarakat, Camat calon desa berdampak, Kepala Desa calon desa berdampak.

Kearifan lokal yang secara rasional bisa berguna di daerah lain dan dikembangkan khususnya dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud

- 1 Di desa Karang Rejo, Kecamatan Garum warga membangun bilik sementara dari anyaman bambu disetiap depan rumah warga sebagai tempat berlindung seluruh anggota keluarga saat terjadi erupsi sebelum dievakuasi menuju tempat pengungsian untuk mengurangi risiko kemungkinan terkena abu vulkanik, kerikil dan batu akibat letusan Gunung Kelud.
- 2 Masyarakat Kabupaten Blitar mengetahui karakteristik Gunung Kelud apabila terjadi letusan yang besar maka setelah itu sudah tahu tidak akan ada susulan letusan berikutnya termasuk material yang dikeluarkan meliputi abu vulkanik, batu, kerikil mereka mengetahui dari sejarah erupsi sebelumnya. Dari pengetahuan turun-temurun tersebut, maka masyarakat dengan sadar melakukan evakuasi seluruh anggota keluarganya ke tempat pengungsian yang telah ditentukan oleh aparat dan Pemda setempat.



dapat menambah perbendaharaan dalam pengembangan cara pengurangan risiko bencana.

Pasca Bencana

Pasca letusan, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang] yang diadakan pada tanggal 6 Maret 2014, dengan salah satu tema yang diangkat mengenai penanggulangan bencana. Kerusakan yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Kelud di wilayah Blitar tidak begitu parah, sehingga kegiatan perbaikan rumah dan fasilitas umum dilakukan oleh swadaya masyarakat dibantu oleh aparat TNI, Polri dan pemerintah setempat. Genting yang rusak diganti dengan genting yang disuplai oleh pemerintah setempat dan dilakukan perbaikan dalam kegiatan karya bhakti ini. Pemulangan pengungsi yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014, saat

status Gunung Kelud diturunkan dilakukan kegiatan karya bhakti di masing-masing permukiman agar penduduk dapat langsung menempati rumah mereka. Selain kegiatan ini penduduk juga diberi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan mereka selama beberapa hari ke depannya.

Sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Timur, bahwa rehab rekon diselesaikan dalam jangka waktu dua minggu, untuk kabupaten Blitar dapat selesai sebelum dua minggu karena tidak adanya kerusakan yang parah dan banyak penduduk yang memperbaiki rumah mereka sendiri. Selain itu perbaikan juga dilakukan untuk memperlancar kembali saluran air ke rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat letusan, perbaikan ini dilakukan dengan menyambung kembali pipa yang patah dan mengganti dengan yang baru apabila pipa tidak dapat digunakan kembali.[spt]

Keberhasilan Kesiapsiagaan **Penduduk Kaki Gunung Kelud**

Sejak naiknya status Gunung Kelud dari normal menjadi waspada pada tanggal 2 Februari 2014, peningkatan statusnya terus meningkat dari waspada [level II] menjadi Siaga [Level III] pada 10 Februari 2014. Tiga hari kemudian, pada tanggal 13 Februari 2014, terjadi gempa berkali-kali dari pagi hingga siang, dalam waktu 12 jam terjadi 453 kali gempa. Terdiri dari 85 kali vulkanik dalam, vulkanik dangkal 245, low frekuensi 65. Selain itu, suhu kawah meningkat. Kamis [13/2] siang, suhunya mencapai 57.4 derajat celcius. Jika suhu kawah mencapai 70 derajat, diperkirakan akan terjadi erupsi. Statusnya belum berubah, yakni tetap 'Siaga'. Setelah kondisi kian kritis, pada pukul 21.15 WIB, status Gunung Kelud berubah dari SIAGA [Level III] menjadi AWAS [Level IV] dan tak lama berselang pukul 22.50 WIB, letusan Gunung Kelud terjadi, dan pada letusan kedua pukul 23.30 WIB melontarkan gas bercampur abu vulkanik secara vertikal setinggi 17 km dan berlangsung selama 3 jam.



Sejak ditetapkan naiknya status Gunung Api dari Waspada ke Siaga, warga sudah meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, sehingga letusan yang terjadi 1 jam 45 menit dari ditetapkannya status Awas tidak menimbulkan korban jiwa.

Salah satunya adalah penduduk Dusun Margomulyo di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, merupakan desa yang terletak paling dekat dengan kawah Kelud. Sejak Gunung Kelud ditetapkan statusnya menjadi SIAGA, masyarakat dipacu kesadarannya untuk lebih siaga dan memahami karakter gunung serta mematuhi himbauan pemerintah untuk mengungsi.

Kesiapsiagaan penduduk yang bermukim di kaki Gunung Kelud ini, patut dijadikan contoh. Komunikasi radio dengan HT adalah salah satunya. Komunitas radio, seperti Orari sangat membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman dalam waktu singkat. Selain itu, radio komunitas juga sangat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti halnya di Kelud terdapat radio komunitas bernama Kelud FM yang didirikan pada pertengahan tahun 2010, untuk menyuarakan kabar aktual aktivitas Gunung Kelud dalam situasi waspada, siaga atau awas yang berasal dari berita Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi [PVMBG].

Tanggap Darurat Erupsi Gunung Kelud

Gunungapi Kelud berbentuk strato, secara administratif terletak di tiga Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan secara geografis terletak pada posisi $7^{\circ} 56' 00''$ LS, $112^{\circ} 18' 30''$ BT dengan ketinggian puncak 1.731 meter di atas permukaan laut. Aktivitas terakhir terjadi pada tahun 2007 diawali dengan peningkatan aktivitas kegempaan dan diakhiri dengan erupsi efusif pada tanggal 3 - 4 November 2007 berupa kubah lava ditengah danau kawah dengan volume kubah sebesar 16,2 juta m³.



Pada 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB, erupsi terjadi lagi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif yang berada di lokasi bencana erupsi terjadi, mendapatkan telepon dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan arahan pada Jumat, 14 Februari 2014 pukul 06.05 WIB sebagai berikut :

- 1 Kepala BNPB agar menangani dampak erupsi Gunung Kelud dengan memperkuat atau mendampingi Pemda Kabupaten Blitar, Kediri dan Malang.
- 2 Penuhi semua kebutuhan pengungsi.
- 3 Gubernur Jatim telah diperintahkan merapat ke daerah untuk memberikan bantuan.
- 4 Pastikan ke PVMBG apakah letusan ini yang terbesar atau akan ada letusan berikutnya.

Kemudian, Kepala BNPB langsung menginstruksikan Deputi dan Direktur di jajaran BNPB untuk segera menindaklanjutinya, dengan penggerahan potensi nasional untuk memberikan pendampingan kepada Pemda Jatim dan Pemda Kabupaten Blitar, Malang, dan Kediri, yakni dari BNPB, TNI, Polri, KemenPU, Basarnas, Kemensos, Kemenkes dan Kemenhub. Bantuan yang diberikan antara lain bantuan logistik dan peralatan, bantuan pendanaan, bantuan administrasi dan manajerial serta pembersihan abu pasir di jalan, rumah dan lingkungan.

Dampak Erupsi Gunung Kelud



Pengerahan personil :

- 1 BNPB, 25 personil
- 2 TNI, 2.815 personil
- 3 Polri, 1.760 personil
- 4 Kemenkes, 25 personil
- 5 Kemensos, 361 personil
- 6 KemenPU, 75 personil
- 7 Kemenhub, 23 personil
- 8 Basarnas, 125 personil
- 9 Relawan, 415 personil

Pada saat kunjungan Presiden RI beserta Ibu Negara dan rombongan menteri akibat meletusnya Gunung Kelud, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] menyempatkan diri memimpin rapat terbatas di Posko Terpadu Penanganan Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Wates. Dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M. Nuh, Menseneg Sudi Silalahi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menpora Roy Suryo, Kapolri Jendral Sutarman, Kepala BNPB Syamsul Maarif, dan Kepala Geologi Kementerian ESDM Surono itu. Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB memaparkan dukungan potensi nasional

yang telah diberikan kepada Provinsi Jatim dan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo juga menyampaikan penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud dan estimasi kerugian dan sebagainya [yang terhitung sampai tanggal 16 Februari 2014].

Estimasi Kerugian langsung akibat erupsi Kelud

Sektor	Estimasi Kerugian [Rp]
Pertanian	1.149.890.565.000
Perkebunan	84.538.425.500
Peternakan	13.471.020.000
Pendidikan	7.139.000.000
Total	1.255.039.010.500

Estimasi Total Biaya Tanggap Darurat

Sektor	Estimasi Kerugian [Rp]
Pertanian	1.149.890.565.000
Perkebunan	84.538.425.500
Peternakan	13.471.020.000
Pendidikan	7.139.000.000
Total	1.255.039.010.500

Estimasi Total Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sektor	Estimasi Kerugian [Rp]
Pertanian	1.149.890.565.000
Perkebunan	84.538.425.500
Peternakan	13.471.020.000
Pendidikan	7.139.000.000
Total	1.255.039.010.500

Pra bencana [mitigasi] erupsi Gunung Kelud telah terselenggara optimal sehingga berhasil meminimalisasi jumlah korban jiwa meninggal dunia. Serta penanganan tanggap darurat sudah terkonsolidasi dan ditetapkan sebagai bencana provinsi karena pemerintahan tidak lumpuh total dan masih dapat mengatasi, sehingga BNPB hanya melakukan pendampingan dan memberikan bantuan yang bersifat ekstrem.

Pada tanggal 20 Februari 2014, Gunung Kelud dari Awas [Level IV] menjadi Siaga [level III] dan berangsur-angsur turun statusnya dari Siaga [level III] menjadi Waspada [level II] pada tanggal 28 Februari 2014.

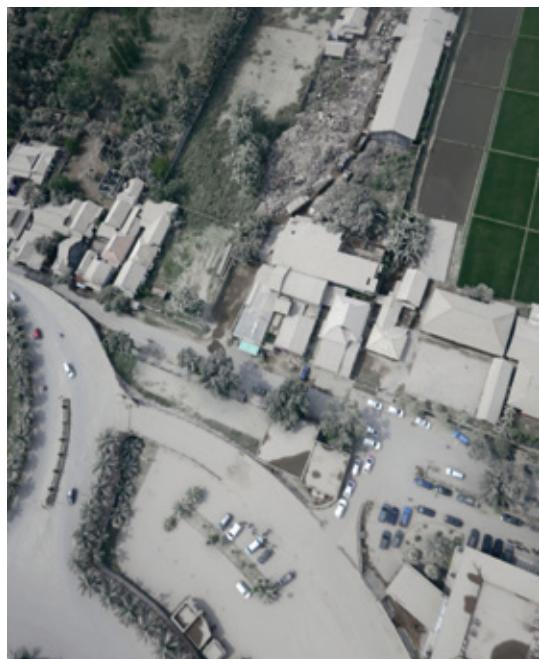
Bandara Ditutup Akibat Abu Vulkanik Kelud

Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Kelud berlaku mulai tanggal 13 Februari - 12 Maret 2014. Penduduk yang berada dalam radius 10 km mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Angin mengarah ke barat menyebabkan dampak erupsi Gunung Kelud menjadi sangat luas, abu vulkaniknya menyebar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan bahkan sebagian Jawa Barat. Erupsi Gunung Kelud juga menyebabkan bandara ditutup, yaitu Bandara Juanda [Surabaya], Adi Sumarmo [Solo], Adi Sucipto [Yogyakarta], Abdurrahman Saleh [Malang], Ahmad Yani [Semarang], Husein Sastranegara [Bandung], dan Tunggul Wulung [Cilacap].

Data Pusdalops BNPB mencatat total korban jiwa yang meninggal akibat erupsi [tidak langsung] karena sakit dan sudah berusia lanjut berjumlah 7 orang, semuanya berasal dari Kabupaten Malang. Korban yang mengalami luka-luka dilaporkan sebanyak 1.423 orang, dimana 31 orang diantaranya terpaksa harus menjalani rawat inap. Jumlah pengungsi mengalami puncaknya pada tanggal 17 Februari 2014, yaitu mencapai 87.629 jiwa.

BNPB dan kementerian/lembaga lain telah memberikan bantuan kepada pemda setempat. Adapun bantuan yang diberikan BNPB senilai Rp. 3.800.732.390,00 berupa makanan tambahan gizi, makanan siap saji, lauk pauk, masker, selimut, dan tenda posko.[acu]





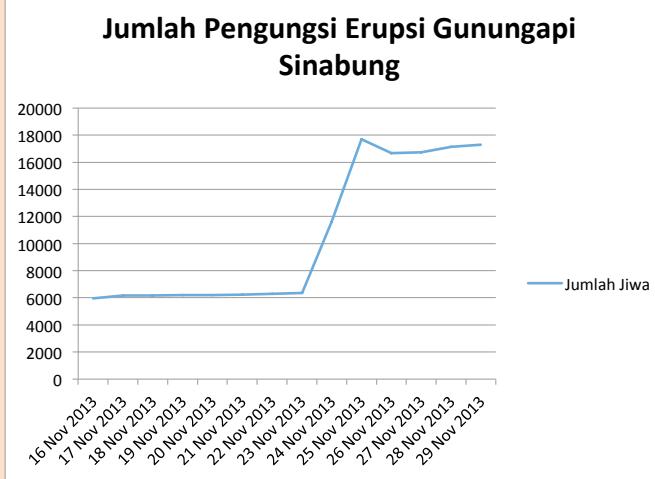
Geliat Gunungapi Sinabung

Selama lebih 1.200 tahun Gunungapi Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tidak menampakkan aktivitas dan masih digolongkan ke dalam gunungapi tipe B. Pada akhirnya tiga tahun lalu, Gunungapi Sinabung meletus dan berdampak pada terjadinya pengungsian. Namun demikian tidak seperti pada tahun 2010, kali ini masyarakat lereng Sinabung mengungsi untuk waktu yang lebih lama.

Setelah sempat tidur, gunungapi ini kembali menunjukkan keaktifan pada Juli 2013. Status pun dinaikkan menjadi 'Waspada' [level II]. Erupsi tiba-tiba terjadi pada beberapa bulan kemudian, tepatnya 15 September 2013. Status gunungapi pun dinaikkan dari 'Waspada' menjadi 'Siaga'. Setelah sempat diturunkan statusnya menjadi 'Waspada' pada 29 September 2013, gunungapi ini kembali ditingkatkan statusnya menjadi 'Siaga' pada 3 November 2013 karena peningkatan aktivitas vulkanik. Aktivitas yang terus meningkat membuat Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi [PVMBG] kemudian menaikkan

status 'Awas' [level IV] pada 24 November 2013. Gunungapi Sinabung mengalami erupsi kembali dengan skala yang lebih besar. Tidak seperti pada erupsi beberapa tahun sebelumnya, karakter erupsi berlangsung perlahan dan lama.

Pemerintah daerah setempat tampaknya belum siap dalam mengantisipasi dan mempersiapkan penanggulangan erupsi Gunungapi Sinabung. Pasca erupsi tiga tahun lalu, pemerintah setempat tidak secara aktif untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] di tingkat kabupaten. Di sisi lain, jalur evakuasi



Gambar 3. Jumlah pengungsi Sinabung sejak 16 November 2013. Sumber : BNPB

dan tempat-tempat penampungan tidak dipersiapkan secara khusus dan proses edukasi bagi masyarakat terkait ancaman dan bahaya gunungapi tidak dilakukan secara aktif.

Namun demikian, ini adalah proses pembelajaran dan refleksi bersama untuk mempersiapkan dengan lebih baik ke depan. Kemajuan telah tampak dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Karo dan kerjasama antara dinas-dinas terkait di kabupaten. Proses edukasi kepada masyarakat disusun dan dibangunnya radio komunitas di sekitar lereng Sinabung. Terbangunnya radio komunitas ini diprakarsai atas bantuan radio komunitas *Combine Resource Institution* [CRI], Jaringan Radio Komunitas Indonesia [JRKI], dan Radio Komunitas Lintas Merapi FM. Radio komunitas yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo mulai siaran perdana pada 24 Februari 2014 dan mengudara pada frekuensi 107.8 FM. Radio komunitas menjadi media masyarakat untuk belajar bersama dalam membangun kesiapsiagaan serta bagian dari sistem peringatan dini.

Lebih dari empat bulan masyarakat lereng Gunung Sinabung berada di pengungsian, khususnya mereka yang berada dalam

zona merah atau radius 3 km dari puncak gunung. Pada awal mula PVMBG telah merekomendasikan masyarakat di radius 5 km dari puncak untuk mengungsi. Pemerintah daerah setempat mencatat lebih dari 17 ribu warga mengungsi pasca erupsi. Masyarakat lereng gunung panik dan pemerintah setempat belum siap dengan pengungsian.

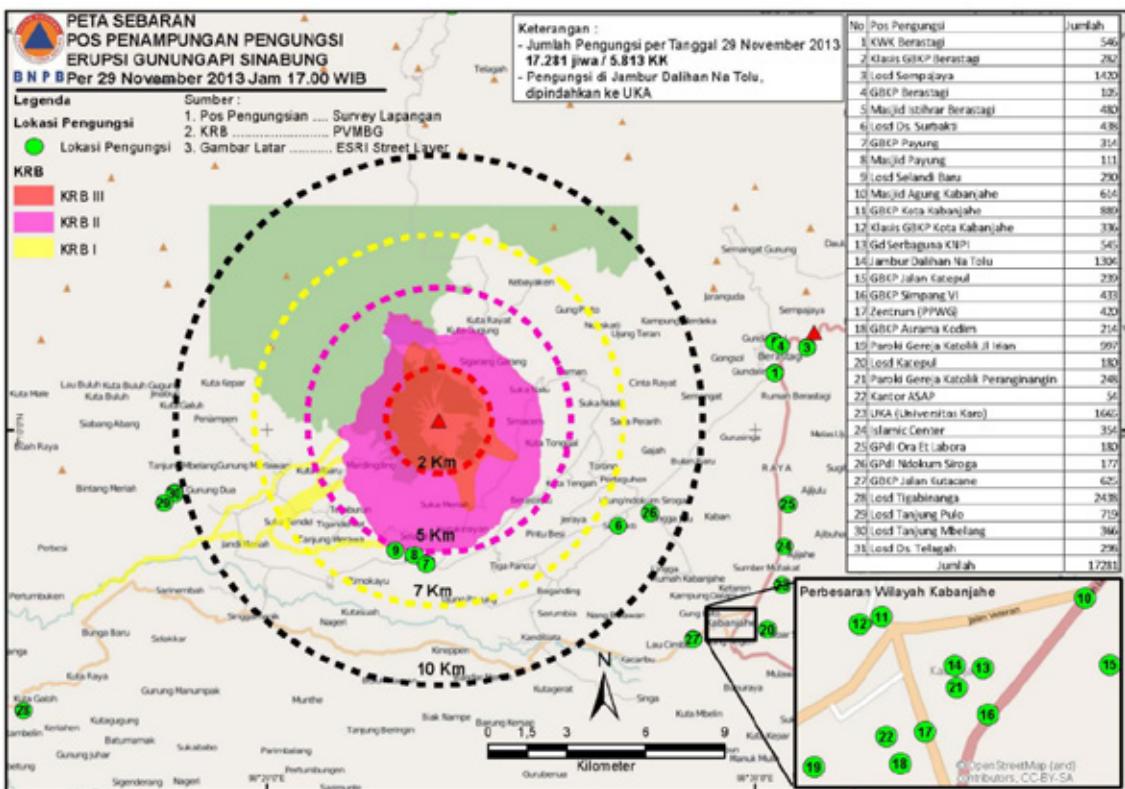
Mereka yang mengungsi ditempatkan di tenda, jambur, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Jambur merupakan balai pertemuan adat masyarakat setempat yang kepemilikannya bisa berasal dari perorangan atau pun kelompok. Mereka mengungsi di jambur-jambur yang berada di Kabupaten Karo. Jambur yang atapnya hanya ditopang oleh tiang-tiang sebetulnya tidak layak bagi para pengungsi. Terpal pun kemudian dipasang sebagai dinding jambur dan keluarga-keluarga pengungsi berkumpul di dalamnya. Mereka tidur tanpa sekat antar keluarga dan barang-barang bawaan mengelilinginya. Meskipun udara malam sangat dingin, mereka tetap bertahan selama di pengungsian.

Tidak hanya tempat pengungsian yang disiapkan untuk para pengungsi, tetapi juga dapur umum, MCK, gudang

Tabel 4. Desa dan Dusun yang harus dievakuasi dari lereng Sinabung

No	Kecamatan	Desa dan Dusun
1	Tiga Nderket	Desa Mardinding, Desa Kuta Mbaru, Desa Temberun, Desa Tiga Nderket, Desa Perbaji
2	Payung	Desa Selandi, Desa Sukameriah, Guru Kinayan
3	Simpang Empat	Desa Berastepu, Desa Gamber, dan Dusun Sibintun
4	Naman Teran	Desa Bekerah, Desa Simacem, Desa Sukanalu, Desa Kuta Tonggal, Desa Sigarang-garang, Desa Kuta Rakyat, Desa Kuta Gugung dan Dusun Lau Kawar

Sumber : BNPB



Gambar 4. Peta sebaran pos pengungsian Sinabung per 29 November 2013.

Sumber : BNPB

logistik, dan pos kesehatan. Pemerintah Kabupaten Karo dibantu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, PMI, dan relawan untuk penanganan masyarakat yang mengungsi. Bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak terus mengalir dan dipusatkan di Pos Komando [Posko] Utama yang berlokasi di Kantor Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Erupsi Gunungapi Sinabung perlahan dan berlangsung selama beberapa waktu. Mereka yang berada di pengungsian tidak menyangka bahwa mereka akan lama tinggal di pengungsian. Sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencarian sehari-hari. Mereka tidak bisa lagi berdagang atau bercocok tanam di kebun, sedangkan anak-anak sekolah terpaksa dipindahkan



ke sekolah lain di Kabanjahe. PVMBG merekomendasikan masyarakat di 21 Desa dan 2 Dusun yang tersebar dalam 4 Kecamatan agar diungsikan.

Di samping itu, Masyarakat Kecamatan Naman Teran [Desa Kebayaken, Desa Naman dan Desa Kutambelin], yang terletak di timur laut dan berada di luar radius 5 km berpotensi terkena material jatuhannya letusan. Desa Kuto Tengah [Kecamatan Simpang Empat], yang terletak pada arah Tenggara bukaan kawah, dan berada di luar radius 5 km dari puncak berpotensi terkena awan panas. Keempat desa tersebut juga diungsikan.

Pada awal pengungsian masyarakat ditempatkan di 31 titik pos penampungan dan mereka yang berasal dari wilayah yang sama memilih untuk ditempatkan di tempat yang sama pula. Berikut peta sebaran pos penampungan pengungsi per 29 November 2013.

Kebijakan Presiden Penanganan Erupsi Sinabung

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] Syamsul Maarif, selaku Komandan Satgas Nasional Penanganan Erupsi Gunungapi Sinabung langsung mengambil langkah konkret untuk

menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] dalam penanganan dampak erupsi Sinabung. Pembenahan jambur dilakukan dengan penipisan jumlah pengungsi di pos-pos penampungan dengan cara menambah 38 jambur [pos penampungan].

Syamsul Maarif juga menginstruksikan jajaran baik BNPB dan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengoptimalkan bantuan dan pelayanan lain seperti kesehatan lingkungan, sanitasi, air bersih, pelayanan kesehatan, MCK, makanan, dan lain-lain di setiap pos penampungan.

Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud] akan memberikan beasiswa Rp 450.000



per siswa untuk 2.815 siswa SD, Rp 750.000 per siswa untuk 2.052 siswa SMP, dan Rp 1 juta per siswa untuk 1.141 siswa SMA yang terdampak erupsi Gunungapi Sinabung. Mahasiswa akan menerima bantuan Rp 2,5 juta. Selain itu, Kemendikbud juga akan menyerahkan seragam sekolah, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, tenda belajar, dan program konseling. Total bantuan yang akan disalurkan sekitar Rp 4,6 miliar. Bantuan tersebut diserahkan kepada para siswa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan bibit bagi para petani apabila mereka ingin menanam bibit sayuran seperti cabe, tomat, ubi, kentang, dan jeruk untuk lahan sekitar 508 ha dan kopi untuk lahan sekitar 65 ha. Peralatan pertanian juga telah diserahkan dari Menteri Pertanian kepada Bupati Karo berupa pompa air, kultivator, dan *hand tractor* yang masing-masing berjumlah 20 unit. Erupsi Sinabung ini berdampak pada sektor pertanian Kabupaten Karo yang disebut sebagai penghasil utama produk-produk tanaman pangan, sayur-sayuran, buah, tanaman hias dan tanaman perkebunan. Data Dinas Pertanian Kabupaten Karo per 19 September 2013 menyebutkan luasan terdampak abu Sinabung mencapai 14.385 ha.

Untuk pemberdayaan masyarakat melalui *cash for work* atau padat karya telah dimulai untuk 2.000 KK di 13 titik terhitung mulai 25 Januari 2014. Bantuan diberikan Rp 50.000/KK/hari. BNPB menggandeng BRI untuk penyaluran dananya ke warga yang bekerja agar transparan.

Dinamika penanganan dan pengungsian

Berdasarkan data Posko Utama bahwa jumlah pengungsi sempat mencapai 32.355 jiwa pada 6 Februari 2014. Hal ini sangat erat kaitannya dengan program bantuan dari pemerintah pusat. Hal yang saat itu harus dilakukan adalah mengunci jumlah pengungsi dengan Surat Keputusan dari Bupati Karo. Pengungsi dengan



jumlah tersebut menjadi tantangan untuk pemerintah daerah setempat.

Meskipun Gunungapi Sinabung masih dinyatakan status 'Awas', PVMBG merekomendasikan beberapa desa untuk dapat kembali. Hal tersebut berdasarkan kondisi Sinabung yang aktivitas vulkaniknya menurun. Rekomendasi yang ditetapkan bahwa ada pengungsi yang sudah diperbolehkan pulang dan masih dalam pos penampungan. Dalam rapat koordinasi harian di Posko Nasional, BNPB dan pihak-pihak terkait lainnya memutuskan untuk melakukan pemulangan pengungsi. Tahap pertama pemulangan adalah Desa Ujung Payung, Payung, Rimo Kayu, dan Batu Karang. Semua desa ini berada di bawah wilayah administrasi kecamatan Payung. Berikut ini Desa-desa yang dikategorikan boleh pulang dan tetap di pos penampungan.

Sebelum dilakukan tahap pemulangan, Posko Nasional melakukan sosialisasi di pos-pos penampungan yang menjadi target pemulangan. Sosialisasi difasilitasi oleh tim media center yang dibantu oleh dinas-dinas terkait dan pelaku perbankan. Dalam menyiapkan pemulangan, Posko Nasional telah melakukan pembersihan maupun perbaikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, perpipaan, dan balai pertemuan setempat. Di samping itu, Kementerian Sosial juga telah menyiapkan jaminan hidup [jadup] bagi masyarakat yang telah kembali ke desa masing-masing.

Sementara itu, tiga desa yang tidak dapat kembali menempati rumah mereka karena berada di dalam radius 3 km. Pemerintah daerah setempat masih melakukan proses kajian untuk pelaksanaan program relokasi untuk ketiga desa tersebut. Desa-desa tersebut adalah Desa Simacem, Bekerah, dan Suka Meriah.

Sejarah Erupsi Gunungapi Sinabung

Gunungapi Sinabung yang tingginya 2.460 meter dari permukaan laut menggeliat dengan letusan dengan skala berbeda. Menurut PVMBG, catatan letusan Gunungapi Sinabung pada 1600 dengan aktivitas vulkanik berupa muntahan batuan piroklastik serta aliran lahar yang mengalir ke arah Selatan. Kemudian 1912, gunung ini mengeluarkan solfatara yang terlihat di puncak dan lereng atas.

Setelah hampir 400 tahun, gunungapi berjenis strato ini kembali meletus. Pada 2010, terjadi beberapa kali letusan yang di antaranya berupa letusan freatik. Letusan pada kurun waktu 7 April 2010 - 27 Agustus 2010 menyebabkan status Gunungapi Sinabung berubah dari tipe B menjadi tipe A. Pada tahun 2010, letusan terbesar terjadi pada 7 September dengan lontaran debu vulkanik hingga 5.000 meter ke udara. Suara letusan pun terdengar hingga jarak 8 km. Mengantisipasi bahaya erupsi saat itu, sekitar dua belas ribu warga dievakuasi ke jambur-jambur di wilayah Kabahjahe. Lontaran debu vulkanik cenderung meluncur dari arah Barat Daya menuju Timur Laut



sehingga sebagian Kota Medan terselimuti debu Gunungapi Sinabung.

Aktivitas yang sempat menurun menjadikan Gunungapi Sinabung berstatus 'Siaga' [level III] pada 23 September 2010. Kemudian status ini kembali menurun menjadi 'Waspada' [level II] pada 7 Oktober 2010.

Berselang tiga tahun, Gunungapi Sinabung menunjukkan aktivitas vulkanik. Meskipun menurun, aktivitas masih cenderung fluktuatif. Pemantauan dengan metoda visual, seismik, dan deformasi terus dilakukan untuk melakukan penilaian tingkat aktivitas Gunung Sinabung. Pada tanggal 15 September 2013 aktivitas Gunungapi Sinabung meningkat hingga menyebabkan perubahan status, dari 'Waspada' [level II] menjadi 'Siaga' [level III]. Namun kemudian pada tanggal 29 September 2013 status diturunkan menjadi 'Waspada' [level II]. Status ini tetap sama berdasarkan data



dan analisis data pemantauan dari tanggal 19 – 24 Oktober 2013. Kemudian aktivitas vulkanik yang terus meningkat, PVMBG kembali menetapkan Gunungapi Sinabung pada Status 'Awas' [level IV]. Saat ini Gunungapi Sinabung berstatus 'Siaga' sejak PVMBG menetapkan status tersebut per 8 April 2014.

Ancaman Bahaya Erupsi Gunung Sinabung

Gunung yang berada dibawah administratif Kabupaten Karo, Sumatera Utara berpotensi bahaya erupsi berupa aliran piroklastik [awan panas], jatuhnya piroklastik [lontaran batu pijar dan hujan abu], aliran lava dan lahar. PVMBG telah memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi dengan

kawasan rawan bencana Gunungapi Sinabung. Tiga tingkat kerawanan dari rendah ke tinggi, yaitu Kawasan Rawan Bencana [KRB] I, KRB II, dan KRB III.

Informasi mengenai ancaman gunungapi ini telah menjadi perhatian BNPB. Oleh karena itu, sebanyak 79 rambu dan papan informasi dari total rencana 110 telah terpasang di beberapa titik. Sisa rambu dan papan informasi yang belum dipasang akan dilakukan setelah kondisi gunungapi kembali normal. Melalui pemasangan rambu dan papan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami mengenai posisi mereka dan potensi ancaman gunungapi Sinabung. Hidup harmonis dengan risiko menjadi pilihan masyarakat lereng Sinabung.[phi]

Level Status Gunungapi		
Status	Makna	Tindakan
Awas [Level IV]	<ul style="list-style-type: none"> Menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi dilakukan secara harian. Piket siaga penuh.
Siaga [Level III]	<ul style="list-style-type: none"> Menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik . Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi di wilayah yang terancam . Penyiapan sarana darurat. Koordinasi harian. Piket penuh.
Waspada [Level II]	<ul style="list-style-type: none"> Ada aktivitas apapun bentuknya. Terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan/sosialisasi. Penilaian bahaya. Pengecekan sarana dan prasarana. Pelaksanaan piket terbatas.
Normal [Level I]	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Level aktivitas dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan rutin. Survei dan penyelidikan.

“Cepat Tepat Menyentuh Rakyat” itulah tema yang diusung pada acara rapat koordinasi penanggulangan bencana pada tahun 2014 yang digelar pada 11 – 13 Maret 2014 di Hotel Bidakara. Tindaklanjut dari amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, saat ini sudah terbentuk 425 BPBD di Seluruh Indonesia yang tersebar di 33 BPBD Provinsi dan 392 BPBD Kabupaten/Kota. Dalam usianya yang ke-6 tahun, BNPB bersama BPBD terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelayanan dalam penanggulangan bencana. Agenda rakornas ini sebagai media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk penyamaan visi, misi dan langkah upaya manajemen bencana dan membangun komitmen bersama untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berimbang antara pusat dan daerah, untuk satu tujuan yaitu melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada seluruh fase bencana.

Rakornas Penanggulangan Bencana Cepat, Tepat dan Menyentuh Rakyat



Warna orange menyala dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2014 ini, suasana ini berada dalam masa-masa tanggap darurat di beberapa daerah, sehingga mempunyai makna bahwa seluruh peserta rakornas BNPB/BPBD bertanggungjawab penanggulangan bencana di pundaknya. Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono yang dalam sambutannya sangat mengapresiasi kinerja BNPB dan mengucapkan selamat untuk BNPB yang sudah menginjak usia ke 6 di tahun ini. Meskipun usianya muda, eksistensi BNPB sudah diakui di dunia internasional.

Dalam pidatonya Menkokesra juga menyinggung 4 Provinsi di Sumatera dan 4 Kalimantan yang terkena bencana asap, akibat kebakaran hutan lahan, 90% kebakaran adalah akibat ulah manusia yang dengan sengaja membakar. Kesamaan gender dalam perlakuan antara wanita dan pria juga menjadi pesan khusus dalam penanggulangan bencana. Kemudian segera mendorong pemda untuk membentuk BPBD yang belum terbentuk, mengaplikasikan "Deklarasi Yogya" dan turut ambil bagian pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

DR. Syamsul Maarif, Msi selaku Kepala BNPB dalam pidatonya mengutip pernyataan



Presiden RI. "Presiden RI berulangkali menyampaikan pemda harus berada di depan saat bencana. Meskipun di tengah bencana selalu ada kritik dan ada yang bekerja, rakyat akan merasakan ketulusan, serius dan cekatan pemerintah dalam menanggulangi bencana" jelasnya. Kepala BNPB dalam pengarahan disampaikan bahwa pada bulan Mei – Juli sudah mulai masuk musim kekeringan, BPBD harus bersiaga dan melaksanakan rencana kontijensinya serta mendukung program BNPB lainnya baik masterplan tsunami, pembangunan shelter, penguatan dan peningkatan kapasitas PRB serta pembangunan kemandirian masyarakat. Pimpinan harus selalu menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Harus selalu konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat walaupun dengan risiko tidak populis. Tepat dengan apa yang dilakukan dan mengatasi masalah yang ada. "Bagi seorang pimpinan, satu aset yang penting adalah kepercayaan rakyat", ungkapnya.

Penandatanganan 9 MoU

Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena untuk kelancaran koordinasi, pada rakornas tahun ini dilakukan 9 penandatanganan MoU antara BNPB dengan Kementerian/Lembaga dan dunia usaha antara lain dengan Kementerian PDT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, LAPAN, ANRI, Bank Indonesia, MNC Media, Metro TV dan Telkomsel. Hingga saat ini sudah tercatat 45 MoU yang sudah dilakukan BNPB.[slm]



Penghargaan BPBD Kabupaten/Kota Terbaik 2014

Kategori Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Juara 1 BPBD Kota Kendari Juara 2 BPBD Kabupaten Kebumen Juara 3 BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Kategori Tanggap Darurat	Juara 1 BPBD Kabupaten Maluku Tengah Juara 2 BPBD Kabupaten Gayo Luwes Juara 3 BPBD Kabupaten Bombana
Kategori Pasca Bencana	Juara 1 BPBD Kabupaten Bojonegoro Juara 2 BPBD Kabupaten Sumba Timur Juara 3 BPBD Kabupaten Bantul
Kategori Logistik dan Peralatan	Juara 1 BPBD Kabupaten Bojonegoro Juara 2 BPBD Kabupaten Banjar Juara 3 BPBD Kota Makassar
Kategori Akuntabilitas	Juara 1 BPBD Kabupaten Demak Juara 2 BPBD Kabupaten Pontianak Juara 3 BPBD Kabupaten Klaten
Kategori Perencanaan, Keuangan dan Kelembagaan	Juara 1 BPBD Kabupaten Bojonegoro Juara 2 BPBD Kabupaten Magelang Juara 3 BPBD Kota Manado
Juara Umum Tingkat Nasional, BPBD Kabupaten/Kota Terbaik 2014	BPBD Kabupaten Bojonegoro

Penghargaan BPBD Provinsi Terbaik 2014

Kategori Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Juara 1 BPBD Prov. Bali Juara 2 BPBD Prov. Nusa Tenggara Barat Juara 3 BPBD Prov. Maluku
Kategori Tanggap Darurat	Juara 1 BPBD Prov. Jawa Tengah Juara 2 BPBD Prov. Sulawesi Utara Juara 3 BPBD Prov. Papua
Kategori Pasca Bencana	Juara 1 BPBD Prov. Jawa Tengah Juara 2 BPBD Prov. Jawa Timur Juara 3 BPBD Prov. Bali
Kategori Logistik dan Peralatan	Juara 1 BPBD Prov. Jawa Tengah Juara 2 BPBD Prov. Kalimantan Timur Juara 3 BPBD Prov. Sumatera Selatan
Kategori Akuntabilitas	Juara 1 BPBD Prov. Sumatera Selatan Juara 2 BPBD Prov. Jawa Tengah Juara 3 BPBD Prov. Jambi
Kategori Perencanaan, Keuangan dan Kelembagaan	Juara 1 BPBD Prov. Jawa Tengah Juara 2 BPBD Prov. Jawa Timur Juara 3 BPBD Prov. Sumatera Selatan
Juara Umum Tingkat Nasional, BPBD Provinsi Terbaik 2014	BPBD Provinsi Jawa Tengah

Menyapa Merapi dan Slamet

Pada Kamis [27/3] pukul 13.03-13.27 WIB terjadi peningkatan aktivitas seismisitas Gunung Merapi. Pada pukul 13.14 WIB terjadi hembusan mengeluarkan abu, hembusan karena adanya pelepasan gas. Merapi yang memiliki ketinggian puncak 2.968 m dpl [tahun 2006] adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara.

Saat terjadi hembusan kondisi puncak tertutup awan, sebelumnya terjadi suara gemuruh dan masyarakat merasakan guncangan. Pukul 13.30 WIB, kondisi sudah normal kembali namun hujan abu terjadi di beberapa tempat seperti di Manisrenggo, Karangnongko [Klaten], Deles, Tegalmulyo dan Tlogowatu. Status gunung Merapi tetap NORMAL [level I] dan kondisi masyarakat normal.

Dua hari kemudian, tepatnya 29 April 2014, pukul 23.30 WIB status Gunung Merapi dari NORMAL [level I] menjadi WASPADA [level II]. Dari pos pengamatan Gunung Merapi dilaporkan terdengar suara dentuman berulang kali hingga radius 8 km dan tercatat gempa guguran 37 kali, MP 13 kali, hembusan 4 kali, tektonik 24 kali, serta gempa LF 29 kali. Peningkatan signifikan terjadi pada jenis gempa LF sebagai indikasi meningkatnya fluida gas vulkanik yang berpotensi menimbulkan letusan.

Gunung Slamet

Sementara itu, 1 hari kemudian tepatnya 30 April 2014, pukul 10.00 WIB, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental serta potensi ancaman bahaya Gunung Slamet, maka statusnya dinaikkan dari WASPADA [Level II] menjadi SIAGA [level III].

Gunung Slamet adalah gunungapi strato berbentuk kerucut, dengan tinggi puncaknya 3.432 m dpl yang secara administratif masuk ke dalam 5 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini, Gunung Slamet masih terjadi gempa-gempanya hembusan dan letusan. Namun tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Teramati erupsi yang disertai letusan abu vulkanik masih terjadi dengan kecenderungan jumlah letusan meningkat hingga saat ini [tebal-kelabu] Hujan pasir di



puncak, hujan abu radius 10 km dengan arah bergantung angin. Semburan abu vulkanik setinggi 300 – 1700 meter dan lontaran batu pijar sudah mencapai lereng pada radius 1.500 m ke arah barat. Kegempaan masih didominasi oleh Gempa Hembusan, Gempa Letusan, dan Tremor serta data deformasi [EDM] mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di bawah kawah puncak.

Tidak Ada Saling Keterkaitan Antar Gunung

Naiknya status Gunung Slamet menjadi SIAGA [level III] dan Gunung Merapi menjadi WASPADA [level II] adalah kewenangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi [PVMBG], Badan Geologi dalam menginformasikan status gunung kepada masyarakat untuk memberikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar gunung. Makna status Siaga bahwa semua data menunjukkan aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang

dapat menimbulkan bencana sedangkan status waspada bermakna terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, baik kegempaan, geokimia, deformasi, dan vulkanik lainnya. Dalam kondisi ini maka tindakan yang diperlukan adalah sosialisasi, penilaian bahaya, pengecekan



sarana, pelaksanaan piket terbatas. Adanya peningkatan aktivitas gunungapi saat ini di Gunung Slamet dan Merapi yang hampir bersamaan tidak ada saling keterkaitannya antara satu gunung dengan lainnya.

Peringatan dini tersebut diberikan kepada BNPB, Kepala Daerah, BPBD dan

Pemda yang memiliki otoritas dalam penanggulangan bencana serta masyarakat harus mengikuti semua arahan dari pihak berwenang dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah beserta pihak terkait adalah sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh.[acu]

Aktivitas Gunung Merapi

15 Juli 2012	08.04 WIB Terdengar suara getaran yang sangat keras, 20:00 WIB Tercium bau belerang. Terjadi hujan abu tipis di Ngargosoko, Dsn Candi, Krinjing dan sekitar Magelang.
22 Juli 2013	04.15 WIB Terjadi hembusan, kolom asap 1.000 m, warna coklat kehitaman disertai suara gemuruh terdengar hingga 6 – 7 km dari G. Merapi.
18 Nov 2013	04.53 WIB Hembusan, kolom asap coklat kehitaman, tinggi 2.000 m. Suara gemuruh terdengar dari Babadan, Jrakah, Selo dan Desa Tlogolele yang berjarak 6-7 km.
10 Maret 2014	06.54 – 07.30 WIB Hembusan asap coklat, tebal, tekanan kuat , kolom asap tegak, setinggi 1500 m. Hujan abu di sektor selatan tenggara [Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Sidorejo dan Balerante.
27 Maret 2014	13.12 – 13.16 WIB Hembusan, G. Merapi tertutup kabut. Suara gemuruh terdengar dan terasa hingga di Desa Pakem, Argomulyo, Glagaharjo, Besi, Museum G. Merapi, Desa Tlogolele dan Tegalrandu. Hujan abu dan lapilli [2-8 mm] di Desa Kepuharjo, Glagaharjo, Argomulyo, Kendalsari, Ngemplakseneng, Deles, Sidorejo,Tegalmulyo, Tlogowatu, Bumiharjo dan Balerante.

Aktivitas Gunung Slamet

Tahun	Aktivitas
1772	Letusan abu, lava
1825, 1835, 1847?, 1849, 1860, 1875, 1885, 1890?	Letusan abu, lava
1934, 1939, 1940	Letusan abu, lava
Periode 1943-1952	Peningkatan kegiatan
1953, 1955, 1957, 1958, 1960, 1961, 1966, 1969, 1973, 1988	Letusan abu, semburan lava tahun 1973
1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007	Peningkatan kegiatan
April 2009	Letusan abu
30 april 2014, pukul 10.00 wib	Peningkatan kegiatan dari waspada [level II] naik menjadi siaga [level III]

Gelar MMdiREx 2014 Padang - Mentawai

Memahami pentingnya upaya pengurangan risiko bencana sebagai wujud mengantisipasi ancaman nyata *Mentawai Megathrust* yang diprediksi akan dihadapi oleh wilayah Sepanjang Pantai Barat Sumatera, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan rangkaian kegiatan latihan untuk memperkuat ketangguhan di tingkat lokal, nasional bahkan regional karena dampak kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana besar.

Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MMdiREx) 2014 dengan tema "Strengthening Collaboration and Partnership in Disaster Response to Build Resilient Region" diselenggarakan mulai tanggal 17 – 22 Maret 2014 di Kota Padang dan Mentawai diikuti lebih dari 5000 personil dan melibatkan 19 negara termasuk Indonesia. Negara yang hadir, Australia, USA, Brunei Darussalam, Vietnam, Cambodia, New Zealand, Malaysia, Myanmar, Rusia, Jepang, India dan lembaga internasional diantaranya, WFP, Pacific Disaster Center, UN OCHA, AHA Center, UN Humanitarian & Mercy Corps. Perhelatan MMdiREx 2014 ini, merupakan tindaklanjut pengarahan Presiden RI pada pertemuan bilateral antara pemerintah RI dan pemerintah Australia dalam KTT Asia Timur



(EAS) di Bali tanggal 19 November 2011, yaitu agar menyelenggarakan kegiatan latihan yang melibatkan sipil-militer dari negara-negara yang tergabung dalam KTT Asia Timur, yaitu 10 negara anggota ASEAN, serta 8 negara mitra wicara ASEAN, yaitu China, Jepang, Korea, India, Selandia Baru, Australia, Amerika, dan Rusia sebagai

sarana memelihara dan menjalin kerjasama yang baik dalam penanggulangan kedaruratan bencana. Arahan ini disepakati dalam *Joint Paper Indonesia-Australia* oleh para pimpinan dalam KTT Asia Timur. MMdiREx 2014 juga merupakan implementasi dari program prioritas *Masterplan Pengurangan Risiko Bencana tsunami*.

Lesson learned atas kejadian gempa 8.5 SR yang lalu terjadi di Pulau Simelue, disimulasikan melalui kegiatan ini. Capaian yang didapat melalui kapasitas kesiapsiagaan yang melibatkan kerjasama serta kemitraan dalam Penanggulangan Bencana antar negara adalah melalui *information sharing*, uji prosedur penerimaan bantuan asing dan uji keterpaduan operasional antar *Incident Command System* dari beberapa negara.

Rangkaian Kegiatan MMDiREx 2014

Indonesia melalui BNPB sebagai penyelenggara perhelatan yang melibatkan beberapa negara telah dimulai sejak tahun 2013. Penyusunan *Matrix Scenario* MMDiREx 2014 sebagai *Base Scenario For Incident Command System* untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan sumber daya

untuk 24 jam, 48, 72 dan 96 jam pertama. Selain persiapan *Working Group* (WG) terkait untuk *Incident Command System and Communication* seperti Geladi Ruang atau *Table Top Exercise* (TTX), Geladi Posko atau *Command Post Exercise* (CPX), / Geladi Lapang atau *Field Training Exercise* (FTX), dilakukan juga persiapan WG untuk event pendukung *Humanitarian Civic Action* (HCA), Evakuasi Mandiri, *Academic Session* serta kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pameran Pengurangan Risiko Bencana dan lomba randai.

17 Maret 2014, *Opening Event MMDiREx 2013-2014* yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ir. H. Irwan Prayitno di Hotel Pangeran Beach – Sumatera Barat, yang dilanjutkan dengan *press conference* dan pembekalan persiapan *Command Post Exercise* (CPX).

18 Maret 2014, Pembekalan CPX & FTX di Hotel Pangeran Beach serta Peresmian Fasilitas Pusat Logistik dan Pelatihan Kebencanaan UPT BNPB di Indarung oleh Kepala BNPB.

19 Maret 2014, Pelaksanaan geladi posko / *Command Post Exercise* antara IC Kota Padang di Kantor PT. Semen Padang dan IC Kantor Bupati Kab. Mentawai dan pembekalan *Field Training Exercise* (FTX), lomba kreativitas menggambar dan membuat poster kebencanaan yang diikuti oleh 900 tingkat SD, SMP di Kota Padang dengan tema "Ayo Siaga Tsunami" dan kuliah umum kebencanaan bertempat di Universitas Andalas oleh Kepala BNPB. Pada saat yang sama juga dilaksanakan kegiatan *Humanitarian Civic Action* (HCA) untuk mensosialisasikan program kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan kegiatan



sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan di 2 tempat, yakni Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan Karya Bhakti berupa pembangunan *shelter* dan rangkaian kegiatan penguatan peringatan dini di Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2013-2014. Sedangkan Bhakti Sosial berupa sosialisasi, pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan lain yang terkait. Kegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan. Melibatkan kurang lebih 1.150 orang masyarakat yang terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu pengobatan gratis dan sunatan massal di Puskesmas Mapaddebat dan Dermaga Tua Pejat. Disamping itu, dilakukan juga sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan. Sedangkan, di Kota Padang melibatkan 1.100 masyarakat dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam 5 kegiatan, yaitu (1) Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan di Pustu Pasie Nan Tigo, (2) Posyandu Air Tawar, Pustu Rimbo Kaluang, (3) Senam lansia di Pelataran Masjid Kalawi, (4) Donor darah di Aula Ma Korem, (5) Pengecatan Musholla Kalawi; dan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Ulak Karang Utara.



20 Maret 2014, Gelar peralatan di Lanud Tabing dengan Irup oleh Agung Laksono - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan pelaksanaan CPX. Pada hari yang sama dibuka secara resmi Pameran Kebencanaan dengan tema "Ayo Siaga Tsunami, tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi" dan lomba randai oleh Kepala Gubernur Sumatera Barat

21 Maret 2014. Kunjungan Wapres RI Boediono serta uji komunikasi pada Fasilitas CPX Indarung dengan Jakarta dan Mentawai, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan geladi lapangan (FTX) di Pantai Purus, Padang disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI, Boediono

22 Maret 2014. After Action Review (AAR) yang diikuti oleh seluruh pelaku, pengendali, pengawas dan perancang dari seluruh negara peserta MMdiREx

2014 dan penutupan pameran kebencanaan yang dimeriahkan oleh penampilan *Standup Comedy* dan *Band Performance* di GOR H. Agus Salim, Padang.

Di Sela Operasi Tanggap Darurat Riau

Kepala BNPB menyempatkan diri hadir pada perhelatan MMdiREx 2014 di tengah Operasi Tanggap Darurat Asap Riau. Beliau hadir melalui jalan darat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Padang sebagai *lesson learned* yang disampaikan pada kuliah umum di Universitas Andalas dan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan BNPB sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI untuk penanganan bencana asap Riau.

Saat berada di Padang, Kepala BNPB juga meresmikan fasilitas UPT Regional Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 2014 di Indarung, Padang.[aal]

Bantuan Indonesia untuk Topan Haiyan Filipina

Siklon tropis Haiyan berlangsung pada tanggal 4 November 2013, pukul 07.00 waktu setempat di Samudera Pasifik, timur laut Papua Nugini, dengan pergerakan siklon ke arah barat laut menuju ke wilayah Filipina. Seiring pergerakannya ke arah Filipina, siklon tropis atau topan Haiyan mengalami peningkatan intensitas hingga tanggal 8 November 2013. Intensitas topan Haiyan mencapai kecepatan angin tertinggi 125 knot atau sekitar 230 km/jam dan tekanan udara terendah 895 Mb. Posisi topan Haiyan pada saat intensitas tinggi berada di koordinat 11.0 LU dan 124.8 BT, sekitar Kepulauan Visayan, Filipina bagian tengah.

Prediksi trajektori topan Haiyan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Filipina dan berangsur-angsur intensitasnya akan turun. Pergerakan topan Haiyan tersebut bergerak ke arah barat menuju Laut China Selatan dengan kecepatan 21 knot atau sekitar 40 km/jam menjauhi wilayah Indonesia. Dampak topan Haiyan memberikan dampak secara langsung di Filipina berupa angin kencang lebih dari 20 knot serta hujan lebat dengan dampak lanjutan berupa tanah longsor.

Pada tanggal 12 November 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] telah memberikan bantuan untuk Pemerintah Filipina melalui Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia yang diterima oleh Duta Besar Filipina untuk Indonesia Mario Rosario C. Aquinaldo sebesar USD \$ 1.000.000 senilai dengan Rp 11 miliar. BNPB mengirimkan bantuan ke Filipina sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 13 November 2013 dengan bantuan senilai Rp 2,5 miliar

yang berupa makanan siap saji sebanyak 5.000 kaleng dan Makanan Tambahan Gizi sebanyak 19.944 dus. BNPB juga mengerahkan 41 personil dalam pengiriman bantuan ke Filipina, yaitu 5 personil dari BNPB, 33 dari TNI AU, serta 3 wartawan



dari Metro Tv dan TV One. Sementara itu, penggerahan 19 personil pada saat pemberian bantuan ke-2 pada tanggal 17 November 2013, terdiri dari 3 personil BNPB, 16 dari TNI AU dan 8 wartawan dari media SCTV, RCTI, Indosiar, Kompas Tv. Bantuan kedua berupa tambahan logistik dan peralatan sebanyak 11,830 ton yang terdiri dari matras 1,2 ton, tenda keluarga 8,25 ton dan makan tambah gizi berupa kue 2,38 ton. Pada pengiriman bantuan kedua disertai peminjaman pesawat Hercules oleh Pemerintah Filipina untuk pendistribusian logistik ke daerah terkena dampak bencana dan juga mengangkut pengungsi ke lokasi aman.

Wilayah terdampak antara lain di wilayah Visayas dan Mindanao dan Tacloban, ibukota Provinsi Leyte. Wilayah Visayas merupakan lokasi terparah akibat topan Haiyan. Tim Indonesia pertama yang tiba tanggal 14 November 2013 dan tim kedua yang tiba tanggal 17 November 2013 disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina Yohanes Kristianto dan Letjen Roy Deveraturda saat tiba di Bandara Militer Cebu.

Yohanes mengatakan bahwa Hercules akan disiagakan sampai tanggal 24 November 2013 untuk membantu Pemerintah Filipina dalam mendistribusikan logistik kepada para korban topan Haiyan. "Kebutuhan akan angkutan transportasi udara di wilayah Tacloban City menjadi salah satu yang paling diharapkan bagi warga yang ingin dievakuasi ke wilayah lain. Dengan dukungan transportasi dari Pemerintah Indonesia tentu diprioritaskan membantu mempercepat penyaluran bantuan dan evakuasi pengungsi dalam beberapa hari kepan," tegasnya.

Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Filipina akan disalurkan ke korban tifon Haiyan ke wilayah Cebu utara, seperti Towns of Tabagon, Bogor, Medelin, Bantayan, Santa Fe dan San Remegio.

Menurut laporan dari Eduardo del Rosario, Direktur Eksekutif Dewan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Manajemen [NDRRMC], mengatakan bahwa total korban



meninggal sejumlah 5.632 jiwa, luka-luka 21.136 jiwa dan hilang 1.769 jiwa. Sementara itu sekitar 2.146.341 KK dari 11.880 desa yang tersebar di 44 provinsi terpapar dampak topan ini. Total rumah rusak sebanyak 1.130.406 unit dengan perincian rumah rusak berat sebanyak 555.514 unit dan rusak ringan sebanyak 574.892 unit. Perkiraan kerusakan hingga triliunan rupiah yang mencakup sektor infrastruktur dan pertanian di tujuh wilayah.

Bantuan BNPB disalurkan secara langsung ke Desa Dumolag, Roxas City pada 18 November 2013. Bantuan yang diberikan berupa makanan tambah gizi berupa kue pada tanggal 18 November 2013. Menurut Remia F Bartolome dari DILG OSWC bahwa Bantuan BNPB sudah disalurkan ke 64 kabupaten, 3 kota dan 3 provinsi. Kabupaten tersebut antara lain: Sibulan, Pulasi, Pandan, Barbaza, Bugasong, Aklan, Batab, Etanza, Balee, Altabas, Illo, Carles, Balasan, Concepcion, Sara, Batan, Ajuy, San Domisio, Lemery, Baeviejo, Lemery, Bengawan, Dumanag, San Rafael. [ayu]

"BNPB tangguh, BPBD tangguh dan wartawan tangguh"

Yel-yel bergema kencang teriak lima puluh wartawan media cetak dan media elektronik peserta Forum Komunikasi Wartawan [FKW]. FKW ini diikuti oleh para wartawan yang berasal Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Wartawan yang baik adalah wartawan yang memiliki mental yang kuat, tegar, dan tangguh. Menjadi wartawan memang tidak ringan, siap ditugaskan kapan pun dan ke mana pun, termasuk ke wilayah bencana. Meliput di daerah yang terdampar bencana jelas membutuhkan kesiapan mental yang tidak ringan, juga berani mengambil risiko.

Pada perkembangannya pemberitaan media akan sangat membantu penanganan bencana. Informasi yang tepat dari media bisa mengkondisikan masyarakat hingga tanggap atas potensi dan risiko bencana yang dihadapi. Mungkin beberapa wartawan terlihat masih gagap memahami bahwa Indonesia adalah negeri penuh gunung api serta potensi bencana lain di tengah perubahan iklim dunia yang ekstrim. Ada baiknya setiap media memiliki sejumlah wartawan yang siap diterjunkan untuk peliputan bencana ini dengan mengikuti sejumlah pelatihan. Mempelajari lebih jauh karakter bencana yang terjadi dari waktu ke waktu, media pun bisa menghadirkan pemberitaan yang lebih bermakna kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] melatih wartawan di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang kebencanaan dan meningkatkan kemitraan antara wartawan dengan BNPB sehingga tercipta hubungan yang sinergis di antara mereka.

Penyelenggaraan FKW tersebut di samping untuk meningkatkan kemitraan juga untuk saling memahami dan mengerti fungsi tugas masing-masing. Media juga bisa menunjukkan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana, juga pelbagai inisiatif masyarakat menolong sesama. Hal ini penting untuk menumbuhkan adanya

harapan di balik peristiwa dahsyat bencana. Dengan media yang lebih sensitif, memberi makna di balik peristiwa, publik pun akan mendapat manfaat dari suatu peliputan yang lebih bermutu, lebih elegan, dan memberi nilai dalam memaknai di balik peristiwa tersebut.

Pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 17 April 2014 mengusung tema "Cepat, Tepat, Menyentuh Rakyat" yang berlokasi di Hotel Somerset Surabaya untuk pelatihan materi dan teori, sedangkan praktik lapangan di lakukan di Pelabuhan Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Selama dua hari, peserta FKW diberikan materi tentang manajemen bencana, karakteristik gunungapi di Indonesia, pengelolaan data informasi kehumasan dalam penanggulangan bencana, penanganan darurat bencana, jurnalisme empati dalam peliputan bencana, dan *trauma healing*. Narasumber berasal dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi [BPPTKG] Drs. Subandrio, M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Jawa Timur Drs. Ec. Sudarmawan, MM, Jurnalis senior LKBN Antara Maria Dian Andriana dan narasumber lainnya.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho secara resmi membuka forum komunikasi wartawan,

menuturkan "Peliputan berita harus memahami sudut pandang kebencanaan terutama saat di lokasi bencana, dan minimnya pengetahuan kebencanaan sehingga perlu diberikan pengetahuan di bidang kebencanaan. Memahami kebencanaan bisa menyelamatkan peliput berita dari resiko terkena bencana. Pernah terjadi saat erupsi Gunung Sinabung ada wartawan yang terkena erupsi gunung Sinabung saat liputan. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kebencanaan dari wartawan masih minim "ujar Sutopo.

Sementara itu, Kepala BPBD Jatim yang dalam kesempatan tersebut diwakili Januar Rachmadi menyebutkan pentingnya pelatihan penanggulangan bencana bagi wartawan. Ia menyampaikan, penanggulangan bencana urusan bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk peran media sangatlah penting, mulai dari pra bencana, saat bencana terjadi, hingga pascabencana. Media dianggap bisa mempengaruhi kebijakan politik dan menyelamatkan nyawa korban bencana melalui tulisannya. "Kami berharap, kapasitas wartawan media massa dalam jurnalistik kebencanaan meningkat melalui kegiatan ini. Peningkatan kapasitas tidak

hanya pengetahuan dari sisi jurnalistik kebencanaan dan penanggulangan bencana, tetapi juga pemahaman mengenai sulitnya menangani bencana dari sisi pelaku", ujar Januar.

Maria Dian Andriana selaku narasumber yang membahas tentang Jurnalisme Empati dalam peliputan Bencana mengatakan bahwa media adalah alat yang memungkinkan kita mengetahui perkembangan yang ada, dengan peliputan yang intensif, dapat diketahui perkembangan bencana tersebut tiap menitnya. Pada liputan kejadian bencana, sering kali kita melihat ada media terasa kurang pas dalam memberitakan informasi perkembangan bencana yang terjadi. Tantangan media saat ini adalah bagaimana yang tercepat dalam menyampaikan berita tanpa menghilangkan keakuratan informasi. Surat kabar akan berhadapan dengan televisi, radio, media online, dan lainnya. Perlu dicari solusi yang lebih jitu menghadapi kondisi ini, keakuratan informasi tetap ada, tanpa mengurangi kecepatan pemberitaan. Ketika kecepatan dikorbankan, media harus dapat memberikan kedalaman informasi, perspektif yang lebih luas, serta juga memberikan makna atas fenomena bencana yang sering terjadi.



BNPB Jadikan Wartawan Tangguh melalui Forum Komunikasi Wartawan

Johny, salah satu instruktur pada pelatihan ini, yang mengajarkan *team building*, menuturkan, peserta kali ini begitu bersemangat dan antusias terhadap apa yang kami ajarkan. Sepertinya tidak mengenal lelah, padahal saat praktek kondisi cuaca benar-benar panas dan tiba-tiba turun hujan pada sore harinya, tidak mengurangi semangat peserta mereka untuk tetap ingin mengikuti kegiatan sampai selesai.

Silvana, salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini menuturkan, kegiatan ini menambah pengetahuan kami terutama dalam penanggulangan bencana. Ternyata dalam penyiapan di dapur umum dalam waktu singkat untuk membuat masakan untuk pengungsi cukup melelahkan dan capek, salah-salah hitung kuota makanan nanti tidak mencukupi bagi pengungsi dan rasanya tidak enak.

Hal sama diutarakan oleh Pudji Leksono, pelatihan ini sangat membantu kami dalam bertugas meliput kejadian bencana, terutama tips-tips saat meliput bencana yang aman. Di samping itu, kegiatan praktek pada hari kedua pelatihan menambah banyak pengetahuan dalam penanggulangan bencana, seperti kerjasama dalam pendirian tenda, pengenalan GPS, pemanfaatan mobil dapur umum, pengolahan *water treatment*, pertolongan pertama dari PMI, dan bagaimana menggunakan perahu karet serta pertolongan korban dengan menggunakan perahu karet.

Dari pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang penanggulangan bencana. Selain itu dapat mendorong peran yang lebih besar dalam informasi mitigasi bencana kepada masyarakat sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dapat lebih berdayaguna dan berhasil. Diharapkan melalui kegiatan Forum Komunikasi Wartawan ini dapat meningkatkan kapasitas para peserta latihan, sehingga di lapangan kelak dapat membantu dalam penyebarluasan informasi terkait bencana dan perkembangannya.[rsp]



Lebih 500 Bencana pada Triwulan Pertama Tahun 2014

Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 551 kejadian telah melanda seluruh wilayah nusantara hingga akhir triwulan pertama tahun 2014. Jumlah tersebut paling banyak terjadi pada bulan Januari, yaitu 258 kejadian.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan pertama tahun 2014 ini bencana di Indonesia

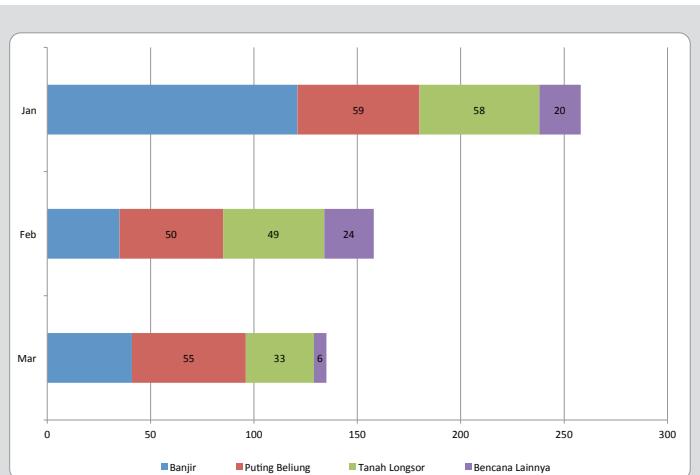
didominasi oleh 3 jenis kejadian, yaitu banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir merupakan bencana paling dominan di bulan Januari yang merupakan puncak musim penghujan. Dua bulan berikutnya dominasi banjir digantikan oleh puting beliung.

Selain bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, dan tanah longsor, bencana lain yang juga terjadi pada triwulan pertama tahun

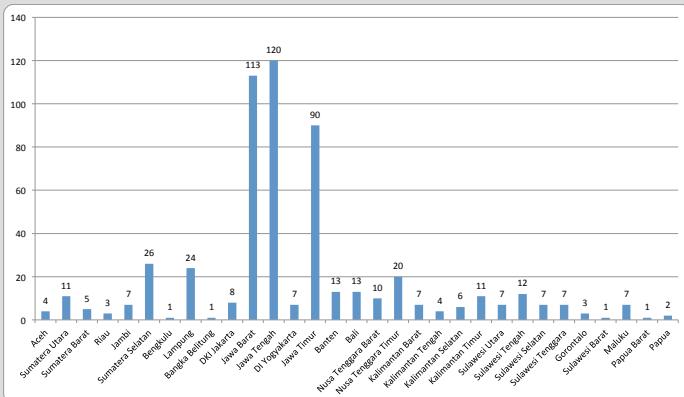
2014 adalah letusan Gunungapi Sinabung dan Gunung Kelud, gempabumi di Kebumen, kebakaran hutan dan lahan di Riau, serta kecelakaan transportasi laut berupa tenggelamnya beberapa kapal di perairan Indonesia.

Dari segi sebarannya, bencana telah terjadi di 31 provinsi di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2014. Bencana yang terjadi terpusat pada 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jumlah penduduk yang tinggi di tiga provinsi tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya jumlah kejadian bencana. Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah kejadian bencana adalah sistem pencatatan yang sudah cukup baik di tiga provinsi tersebut.

Bencana-bencana yang melanda Indonesia sejak awal tahun telah banyak menimbulkan kerugian, baik korban jiwa maupun



Gambar 5. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan Januari-Maret 2014



Gambar 6. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Menurut Provinsi

kerusakan. Dari segi korban jiwa, hingga akhir Maret 2014 sebanyak 299 orang meninggal dan hilang akibat bencana. Jumlah ini paling banyak disebabkan oleh bencana banjir. Korban luka akibat bencana mencapai 1.571 orang, yang terbanyak disebabkan oleh letusan gunungapi. Adapun korban yang terdampak dan terpaksa mengungsi akibat bencana mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa.

Kerusakan permukiman warga akibat bencana di sepanjang triwulan pertama tahun 2014 mencapai 31.392 unit, dengan rincian 16.119 rusak berat, 1.244 rusak sedang, dan 14.029 rusak ringan. Jumlah ini paling banyak disebabkan oleh bencana letusan gunungapi. Adapun permukiman warga yang tidak mengalami kerusakan namun terendam banjir sebanyak 285.078 unit.

Selain merusak permukiman, bencana juga menimbulkan

kerusakan pada fasilitas umum. Sebanyak 28 unit fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, sedangkan fasilitas peribadatan yang mengalami kerusakan mencapai 110 unit dan fasilitas pendidikan 317 unit.

Perkiraaan kerugian akibat bencana secara ekonomi juga mencapai angka yang sangat tinggi. Kerugian akibat bencana asap dari pembakaran lahan dan hutan di Riau misalnya, secara ekonomi diperkirakan dampaknya adalah sebesar Rp 10 triliun lebih. Kerugian sebesar itu muncul antara lain akibat menurunnya produktivitas usaha. Di samping itu mobilisasi barang dan orang baik melalui transportasi darat, udara dan laut juga tertunda dan terganggu akibat kabut asap tersebut.

Selama Januari 2014, bencana telah menyebabkan inflasi 1,07%. Inflasi ini lebih besar daripada

Januari 2013 yakni 1,03%. Kerugian dan kerusakan akibat banjir Jakarta diperkirakan Rp 5 trilyun. Jumlah kerugian tersebut belum lagi ditambah dengan efek berantai akibat terhambatnya berbagai aktivitas ekonomi. Kerugian dan kerusakan banjir di pantai utara Jawa (dari Banten-Jabar-Jateng dan Jatim) diperkirakan mencapai Rp 6 trilyun.

Kerugian dan kerusakan tersebut belum dihitung dari dampak biofisik, sosial, kesehatan, dan politis. Sebagai gambaran adalah dampak bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Dampak biofisik berkaitan dengan pelepasan asap, emisi CO₂, NO_x, dan CH₄ berdampak pada pemanasan bumi. Kebakaran akan memusnahkan flora, fauna dan biodiversitas ekosistem di darat. Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia pada 1997 saja telah menimbulkan emisi 0,8-2,6 miliar ton CO₂ ke atmosfer atau setara dengan 13-40% emisi CO₂ kebakaran hutan pada tahun tersebut di dunia. Dampak sosial antara lain berkurangnya sumber mata pencaharian, kurangnya ketersediaan air, sekolah libur, dan lainnya. Sementara itu bencana asap juga berdampak pada kesehatan seperti gangguan ISPA, iritasi mata, asma, batuk, dan sebagainya.

Biaya yang digunakan untuk melakukan penanggulangan bencana juga besar. Untuk

penanganan darurat erupsi Gunungapi Sinabung yang sudah berlangsung sejak tahun 2013, BNPB mengalokasikan Rp 148 miliar. Penanganan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan, BNPB menganggarkan Rp 300 miliar. Penanganan darurat erupsi Gunung Kelud, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menganggarkan Rp 1 trilyun, sedangkan untuk penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah membutuhkan Rp 3,59 trilyun. Penanganan pasca bencana banjir

bandang di Sulawesi Utara membutuhkan Rp 1,03 trilyun.

Sementara itu, dana cadangan penanggulangan bencana per tahun hanya ada Rp 3 trilyun, yaitu untuk tanggap darurat Rp 1,5 trilyun dan penanganan pasca bencana Rp 1,5 trilyun. Jumlah tersebut dianggarkan untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia.

Kesenjangan antara kerugian yang timbul dan anggaran yang tersedia menjadi tantangan yang

mau tidak mau harus dihadapi. Jika anggaran yang tersedia tidak dapat diubah, pilihan yang tersisa adalah meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Salah satu caranya adalah dengan berusaha meningkatkan kapasitas para pelaku dalam penanggulangan bencana, mulai dari warga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun swasta dan dunia usaha. Dengan meningkatnya kapasitas semua pihak, diharapkan dampak yang timbul akibat bencana dapat dikurangi hingga seminimal mungkin.[rns]

Tabel 5.

Jumlah Kejadian, Korban, dan Kerusakan Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana dan Bulan

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan						
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
Unit											
Banjir	121	55	7	1.215.705	415	11	145	257.264	1	20	34
Puting Beliung	59	35	23	1.079	274	180	2.410	-	18	10	
Tanah Longsor	58	61	25	4.479	530	163	170	-	5	2	
Banjir Dan Tanah Longsor	6	27	1	41.622	494	48	331	1.301	16	-	
Kecelakaan Transportasi	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gelombang Pasang	4	-	2	178	18	6	7	284	-	1	
Kebakaran Lahan Dan Hutan	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Gempa Bumi	1	-	-	-	165	16	51	-	1	-	
Letusan Gunungapi	1	37	-	33.210	-	-	-	-	-	-	
Total Januari	258	237	58	1.296.273	1.898	424	3.114	258.849	17	45	48
Januari											
Banjir	50	-	15	825	163	254	1.511	-	2	2	
Puting Beliung	49	9	9	11.287	994	41	581	50	-	2	
Tanah Longsor	35	1	-	183.586	60	58	3	18.214	-	3	
Banjir	13	-	-	425	90	-	-	-	-	-	
Kebakaran Lahan Dan Hutan	5	9	2	2.789	86	3	150	67	-	-	
Banjir Dan Tanah Longsor	3	-	-	2.845	4	-	462	-	-	-	
Gelombang Pasang	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecelakaan Transportasi	1	7	1.423	87.629	12.404	-	5.426	9	37	251	
Letusan Gunungapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Februari	158	30	1.449	289.386	13.801	356	8.133	18.331	9	44	258
Februari											
Banjir	55	3	45	260	277	434	2.542	-	13	6	
Puting Beliung	41	5	2	22.288	83	8	173	7.898	-	3	
Tanah Longsor	33	23	17	64	33	20	56	-	1	2	
Gelombang Pasang	2	-	-	102	26	-	-	-	-	-	
Banjir Dan Tanah Longsor	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Gempa Bumi	1	-	-	-	1	-	11	-	4	-	
Kebakaran Lahan Dan Hutan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecelakaan Transportasi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Maret	135	32	64	22.714	420	464	2.782	7.898	2	21	11
Total	551	299	1.571	1.608.373	16.119	1.244	14.029	285.078	28	110	317



Ina-DRTG Fasilitasi Profesionalitas Penanggulangan Bencana Indonesia

Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana. Setiap kejadian bencana memberikan pembelajaran kepada para pelaku penanggulangan bencana. Karakteristik penanggulangan di setiap kejadian bencana dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti kondisi wilayah, demografi, budaya, hingga dinamika politik lokal. Hal tersebut merupakan tantangan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai salah satu langkah untuk menjawab tantangan itu, BNPB telah memiliki fasilitas *Indonesia Disaster Relief Training Ground* (Ina DRTG). Ina DRTG ini merupakan salah satu gedung sebagai bagian dari Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (*Indonesia Peace and Security Center/IPSC*). Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan IPSC beberapa waktu lalu. Berada satu kompleks dalam IPSC selain Ina DRTG antara lain Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Pusat Pasukan Siaga TNI, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradikalisis, Pusat Pengembangan Bahasa, dan Universitas Pertahanan dan Pusat Olahraga Militer.

Ina DRTG yang berlokasi di Bukit Merah Putih, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Sentul, Jawa Barat ini bertujuan antara lain sebagai (1) Markas dan Sekretariat Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB); (2) Pusat Pemantau Ancaman dan Kajian Risiko Bencana, dan Informasi Bencana; (3) Cadangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Pusat Pelatihan dan Simulasi Pusdalops; (4) Akademi Pelatihan Penanggulangan Bencana yang bertaraf internasional.

Sebagai Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops), BNPB telah mengembangkan prototip pusdalops modern yang fungsi utamanya untuk pelatihan pengendalian

dan komando. Pusdalops ini digunakan sebagai alternatif apabila terjadi bencana nasional dan melibatkan suatu tim besar untuk komando dan koordinasi tanggap darurat selama 24 jam. Pusdalops ini akan terhubung dengan pusdalops di provinsi melalui *Disaster Management Information System* (DMIS). Di samping itu, pusdalops juga terhubung dengan *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management* atau AHA Center dalam hal bantuan dan pelaporan regional.

Ina DRTG yang berada di area seluas 4 ha ini menjadi tempat akademi pelatihan penanggulangan bencana berskala nasional dan internasional. Saat ini BNPB bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri serta mengusahakan akreditasi internasional (ISO) untuk pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan di tempat ini.

Fasilitas yang dimiliki Ina DRTG terbagi atas fasilitas pelatihan *indoor* dan *outdoor*, akomodasi, bangunan khusus, gudang logistik dan peralatan, kantor administrasi dan ruang pendukung lainnya. Fasilitas yang khusus dan dibutuhkan pada saat terjadinya bencana, antara lain *Situation & Crisis Room* yang canggih bagi Presiden, Kepala BNPB, Menteri serta manajer bencana setara yang terkait dan Ruang Penyimpanan data dan

analisa dengan sistem yang sama dengan Pusdalops Inti di Jakarta Pusat sehingga bisa terjadi transisi yang mulus pada saat terjadi bencana nasional.

Fasilitas pendukung untuk para peserta pelatihan, Ina DRTG memiliki fasilitas akomodasi yang dilengkapi dengan kafetaria dan wifi. Fasilitas akomodasi didesain dengan model barak berkapasitas 12 dan 30 orang. Selain barak terdapat juga kamar tidur berkapasitas 2 dan 4 orang, kamar suite, wisma, ruang latihan dan rekreasi.

Selain dirancang sebagai tempat pendidikan dan pelatihan, Ina DRTG dilengkapi juga dengan bangunan-bangunan khusus dan gudang.

Dengan fasilitas yang lengkap dan representatif ini, BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) mengembangkan tugas untuk menciptakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Telah disusun pula pengembangan metode pelatihan secara komprehensif seperti pelatihan (seminar, *workshop*), simulasi (TTX, Permainan/game, drill), dan pengujian (CPX/Geladi Posko dan FTX/Geladi Lapangan).

Mengawali pemanfaatan Ina DRTG, Pusdiklat BNPB menyelenggarakan pelatihan tim



reaksi cepat (TRC) pada 14 April 2014 lalu. Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta 100 orang yang terdiri dari 20 perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota di mana setiap BPBD mengirimkan 5 orang peserta. Peserta lainnya berasal dari lingkungan BNPB. Pelatihan yang berlangsung 5 hari ini mencakup pelatihan Standar Minimal Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Dinamika Kelompok, Pos Komando Tanggap Darurat, Pengenalan Radio Komunikasi, GPS, Pengenalan DIBI, Peran TRC, Manajemen Dasar, Pertolongan pertama pada korban bencana, Penanganan Darurat Korban Massal, Kaji Cepat Lapangan, dan Simulasi.[phi]



Fasilitas Indoor dari Ina DRTG

- 1** Pusat Simulasi dan Pelatihan berteknologi tinggi termasuk Ruangan Hening;
- 2** Ruang Pelatihan Multi-Fungsi dan Auditorium
- 3** Aula/Amphitheatre multi-fungsi;
- 4** Ruang Belajar interaktif dan pusat informasi (perpustakaan);
- 5** Pusat Media dan Komunikasi – juga untuk mendesain publikasi;
- 6** Pusat Pengembangan Kurikulum.
- 7** Sarana pelatihan dalam ruang tertutup.

Fasilitas Outdoor dari Ina DRTG

- 1 Lokasi Simulasi *Urban Search and Rescue* (USAR) termasuk lokasi reruntuhan (*rubble site*);
- 2 Sarana pelatihan *outbound*;
- 3 Kolam renang untuk simulasi pelatihan dalam air;
- 4 Sarana olah raga (termasuk gedung olah raga dan lapangan serba guna);
- 5 Sarana relaksasi di luar ruangan dan taman;
- 6 Helipad;
- 7 Area parkir;
- 9 Area latihan operasi bantuan kemanusiaan darat, laut dan udara menggunakan fasilitas *Peace Keeping Force Training Center*.

Fasilitas lain dari Ina DRTG

- 1 Gudang 1: tempat penyimpanan peralatan tanggap darurat; perlengkapan SRC-PB; kendaraan dll. dengan ruangan untuk kantor.
- 2 Gudang 2: tempat penyimpanan untuk bahan pangan dan nonpangan serta suplai emergensi lainnya untuk respon yang cepat. Dilengkapi dengan kantor.
- 3 Sarana penyimpanan material berbahaya;
- 4 Kandang anjing untuk dipergunakan oleh Tim USAR domestik dan dari luar negeri;
- 5 Bengkel perawatan dan garasi;
- 6 Manajemen gudang emergensi nasional yang terkomputerisasi dan sistem penelusuran (*tracking*) yang menghubungkan Ina DRTG dengan gudang-gudang di tingkat regional (seperti di Medan, Makassar dan Surabaya) untuk koordinasi bantuan cepat yang efektif;
- 7 Gudang-gudang tersebut juga akan dipergunakan untuk pelatihan pergudangan dan logistik praktis.

Fasilitas Kantor Administrasi dan ruang pendukung lainnya

- 1 Kantor untuk Kepala Ina DRTG dan staf administrasi.
- 2 Kantor yang terpisah untuk setiap unit pelatihan – cukup besar untuk masing-masing tim yang terdiri dari sekitar 10 orang.
- 3 Ruangan kantor untuk koordinator pelatihan dan kepala instruktur pelatihan
- 4 Ruangan kantor yang terbuka untuk pelatih spesialis
- 5 Ruang Rapat dan Pertemuan
- 6 Ruang Media dan Konferensi Pers
- 7 Ruang Kantor untuk tim Pengembangan Kurikulum
- 8 Ruang Kantor untuk staf korporat seperti bagian keuangan, HR, dll.
- 9 Kantor Hubungan Internasional.



Jiwa yang
Merdeka
membuat
Pikiran kita
Merdeka

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB
Ir. Tri Budiarto, M.Si.

Motto yang tegas dari seorang Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Tri Budiarto, M.Si adalah "Jiwa yang merdeka membuat pikiran kita merdeka". Kisah perjalanannya sebelum menjadi seorang deputi di lingkup BNPB diawali melalui usaha kerasnya setelah lulus tahun 1982 dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ekonomi Perusahaan Hutan di Yogyakarta. Sepuluh hari setelah menyandang Predikat S1, pria kelahiran 1 November 1957 ini memilih menjadi tenaga honorer di Desa Nanga Kebebu, Kabupaten Melawi, Kecamatan Nangapinoh, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek Reboisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mekanis Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. "Karena pada saat itu, di sana satu-satunya yang memiliki reboisasi DAS yang menggunakan mekanis", ucap Tri Budiarto mengisahkan perjalanan hidupnya.

Selama 2,5 tahun menjadi tenaga honorer, dan ditugaskan di daerah terpencil Kalimantan Barat, membuat dirinya yang bukan asli penduduk setempat bermanfaat untuk orang lain sehingga banyak orang mengenal baik keberadaannya. "Dahulu saya mengerjakan apa yang dikatakan pimpinan, terima saja jika memang diberikan tugas oleh atasan dan tidak mengeluh" tuturnya.

Selain proyek lapangannya dirancang mekanisme untuk percontohan, seorang Tri Budiarto juga menjadi petugas lapangan mengawasi persemaian, tanaman, pemeliharaan dan kebakaran hutan dan pertanamanan. "Saya mempunyai 60 anak buah langsung yang belum menikah dan saya bekerja di sana selama dua tahun delapan bulan", kenangnya.

Pada tahun 1985, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan di Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan dan hanya bertahan satu tahun di Jakarta, membuatnya tertantang kembali untuk bertugas di hutan rimba. Tahun 1986, mulai bertugas di Kalimantan Timur sebagai Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, yang bertugas mengurus pabrik-pabrik dan sebagainya, selama sembilan tahun. Ditempatkan di Kalimantan Timur, menurut Tri Budiarto, merupakan kantor yang bergengsi karena dapat memproduksi 60 juta hektar kubik kayu per hektar dan termasuk HPH. Saat itu kantornya dalam kategori Kanwil tipe

A. Perjalanan karir pun berlanjut, setelah dari Kalimantan Timur, sempat dipindah ke Denpasar, dengan Kanwil tipe C, selama tiga tahun. "Maret 1998 saya dipindah lagi ke Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Waktu itu menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Usaha Kehutanan selama dua tahun kemudian pindah kembali menjadi Kepala Bidang Produksi", kisahnya.

"Yang menarik adalah saya pindah saat reformasi dimana politik lokal sangat kental dan dinamis. Penolakan terhadap suku Jawa yang menjadi pejabat di Kalimantan Barat. Sampai enam tahun menjadi Kepala Bidang Produksi di sana dan dengan tekanan yang semakin berat", ucapnya. "Kantor didemo menjadi makanan sehari-hari" tambahnya. Tahun 2005 diangkat menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2007. Tugas saya adalah bagaimana mengkonsolidasikan institusi pemerintah daerah yang hancur lebur, tugas berat saya adalah memediasi hubungan baik kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang terporakporanda dan menyelesaikan illegal logging.

Pengabdian berlanjut di BAPEDALDA dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kemudian, ditempatkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur, perpindahan itu membuat saya mengevaluasi diri dari kebijakan politik lokal yang menurutnya tidak adil. "Saya senior di BPBD namun



karena bukan orang lokal di sana, tidak mungkin diusulkan menjadi Sekretaris Daerah”, ucapan Tri Budiarto. Saya memulai membangun secara perlahan BPBD, yang awalnya tanpa mempunyai kantor, tidak mempunyai staf, tidak punya mesin ketik dan sebagainya, tapi itu tidak menghalangi niat saya untuk membesarkan BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Perjalanan waktu membawa saya pada bulan Mei tahun 2010 bertemu Kepala BNPB. Pak Syamsul Maarif datang ke Pontianak terkait dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada saat itulah, kesempatan datang untuk mengabdi di BNPB, proses administrasi tidak sampai satu bulan. Tepatnya 22 Desember 2010, saya dilantik menjadi Direktur Tanggap Darurat, bersama Pak Sutopo dilantik di salah satu hotel besar di Bogor.

“Hikmah dari pertemuan ini adalah bahwa kita tidak pernah tahu skenario Tuhan. Dari perjalanan-perjalanan ini, bagi adik-adik saya rasanya perlu merencanakan sesuatu tanpa harus mengatakan bahwa itu pasti terjadi termasuk karir kita. Hal ini perlu sebagai ancang-ancang kita mengejar sesuatu yang jelas dalam arti positif. Kita harus mengskenariokan diri kita untuk ruang dan waktu yang berbeda dan itu adalah pilihan bukan takdir”, imbuhnya.

Amanah menjadi Direktur Tanggap Darurat, langsung saya laksanakan dengan tugas pertamanya adalah pada 3 Januari 2010. Tepat pada jam 08.30 mendapat tugas dari Deputi Penanganan Darurat pada waktu itu untuk menangani banjir di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang mempunyai luas 137,01 km², dengan penduduk 14.388 jiwa dan jarak dari Kota Sumbawa Besar 61 km. “Saya, dengan Pak Wignyo, Pak Anis dan Pak Eko, selama lima hari di NTB”, kenangnya.

Keinginan Sederhana

Menjabat selama 2,5 tahun di Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, dan saat ini dipercaya menjabat sebagai seorang Deputi. Tri Budiarto yang belum genap satu tahun menjabat sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat, ada mimpiya yang sederhana namun berat hakikatnya.

“Keinginan saya sangat sederhana, pertama semua bencana yang terjadi dapat ditanggulangi bersama dengan sesegera mungkin dan tanpa korban dengan cara memperkuat jaringan dan informasinya prima. Kedua, kerjasama internal di kedeputian penanganan darurat harus bagus, jangan tersegmentasi dan terpolarisasi. Pengalaman dan tugasnya disamaratakan” harapnya.

“Apa yang terjadi dalam diri kita adalah fungsi dari perilaku, usaha, keahlian kita

dan penilaian sekitar kita terhadap kita sendiri. Tanpa bermaksud mendahului Tuhan, targetnya jelas, fungsi dari usaha dan keahlian kita", pesannya.

Dalam kurun empat tahun ini, ada peningkatan kualitas dari daerah-daerah. Semenjak dari tahun 2011, semua kabupaten/kota lebih tinggi tingkat kesadarannya dalam penanggulangan bencana. Hubungan antara kabupaten semakin bagus, secara konkret di Provinsi Jawa Tengah.

Pada satu sisi semakin banyak jumlah bencana terjadi di Indonesia, korban dan kerugiannya meningkat. Sebabnya apa dan sebagainya harus dikaji lebih komprehensif. Segala sesuatunya perlu kemampuan yang berkualitas di jajaran pelaku penanggulangan bencana di Indonesia. Ini salah satunya juga yang menjadi harapan beliau.

Di sisi lain, harapannya terhadap kementerian/lembaga semakin merespon dengan tupoksinya masing-masing. Beliau mencontohkan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau, kementerian terkait menjadi *leading sector* dalam upaya mengamankan hutan dan lahan dari upaya-upaya eksploitasi ilegal.



“ Hikmah dari pertemuan ini adalah bahwa kita tidak pernah tahu skenario Tuhan. Dari perjalanan-perjalanan ini, bagi adik-adik saya rasanya perlu merencanakan sesuatu tanpa harus mengatakan bahwa itu pasti terjadi termasuk karir kita. Hal ini perlu sebagai ancang-ancang kita mengejar sesuatu yang jelas dalam arti positif. Kita harus mengskenariokan diri kita untuk ruang dan waktu yang berbeda dan itu adalah pilihan bukan takdir. **”**

Penanganan bencana yang tidak boleh dilupakan adalah kolaborasi BNPB dengan kementerian/lembaga terkait serta TNI / Polri sehingga penanganan bencana menjadi sangat baik. Hal ini yang menurutnya harus dikuasai bersama antar pihak. "Apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan apa", lugasnya. Fungsi komunikasi menjadi hal yang sangat penting, komunikasi tidak hanya terbatas secara administratif, namun banyak hal yang dapat kita lakukan dengan komunikasi.

Pada akhir bincang-bincang, Tri Budiarto kembali mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki nilai gotongroyong. Ini menjadi modal yang sangat berharga dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Beliau mencontohkan pada kasus erupsi Gunung Kelud, masyarakat berinisiatif sendiri dalam membersihkan abu vulkanik. Di samping itu, mereka bahu membahu untuk membuka dapur mandiri, dan memberikan makanan bagi tetangganya yang sedang mengungsi. Nilai-nilai etos kerja seperti itu belum tentu dapat terjadi di daerah lain. Menggali kembali sisa-sisa kearifan lokal yang dapat dikembangkan, untuk menopang kekuatan pemerintah dalam menangani bencana. "Kadang perseteruan politik lokal yang membuat kebersamaan, gotongroyong dan *local wisdom* yang menjadi luntur" ucapnya.[acu]

■ Snapshot



BNPB menerima 2 penghargaan dari Rakyat Merdeka Online (RMOL) dengan predikat "2014 Golden Performance Award" dan "2014 Public Campaigner Award" di Jakarta pada malam budaya Manusia Bintang 2014 pada 22 Maret 2014.



Kunjungan para menteri luar negeri Melasnesian Spearhead Group (MSG) ke BNPB, Jakarta, 14 Februari 2014.



Peluncuran dan pelatihan perdana InaSAFE 2.0 di INA DRTG, Sentul, Jawa Barat, 7 April 2014.



Kunjungan Pangeran Brunei Darussalam ke BNPB, 3 Mei 2014.



Kunjungan Austrian Institute of Technology (ATI) ke BNPB, 7 Mei 2014.



TOKOH INSPIRATIF 2014 DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1) Tokoh Masyarakat adalah WNI yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Tulisan berisi kisah tentang kegiatan dan peranan Anda sebagai tokoh masyarakat dalam penanggulangan bencana atau orang yang Anda rekomendasikan sebagai tokoh masyarakat yang layak mendapatkan penghargaan sebagai orang yang berperan dalam penanggulangan bencana (pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana), dilihat dari aspek sosial budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, dll.
- 3) Naskah narasi tokoh masyarakat yang ditulis merupakan kisah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan rekaan, terjemahan, fiks dan sebagainya yang bersifat semu.
- 4) Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Para pemenang (tokoh masyarakat yang diceritakan) bersedia mengikuti rangkaian kegiatan penerimaan hadiah secara penuh pada malam anugerah yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara.
- 6) Batas akhir penyerahan karya tanggal 10 Oktober 2014, pada jam 16.30.
- 7) Naskah narasi diketik maksimal 2 halaman A4, dengan format Ms. Word dengan format memakai font Times New Roman 12 dan spasi 1,5 halaman.
- 8) Naskah narasi dapat dikirimkan dalam bentuk ketikan hardcopy atau email, tuliskan **Tokoh Inspiratif 2014** di bagian kiri atas amplop atau subjek email Anda, sertakan biodata singkat (nama, nomor telepon/HP, foto tokoh masyarakat yang diceritakan dan fotocopi KTP).
- 9) Naskah dapat dikirimkan ke :
Panitia Lomba Kreativitas BNPB 2014
Pusat Data, Informasi dan Humas, Lantai 4
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
JL. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Email :
humas@bnpb.go.id
anugerahbnpb@gmail.com



http://twitter.com/BNPB_Indonesia



<http://facebook.com/infobnbp>



<https://www.youtube.com/BNPBindonesia>



B N P B
www.bnpb.go.id



TANGGUH AWARD

Lomba Kreativitas

BIDANG KEBENCANAAN 2014



FOTOGRAFI	KARYA TULIS JURNALISTIK	FILM DOKUMENTER	PADUAN SUARA
<ul style="list-style-type: none"> Melampirkan softcopy CD foto dan cetakan foto ukuran 10 R. Edit foto hanya diberikan pada toleransi contrast, level, brightness dan tidak diperkenankan memanipulasi foto. Foto ditempel keterangan : judul, disertai <i>caption</i>, nama lengkap, alamat, pekerjaan, No. Telp/HP, dan email. 	<ul style="list-style-type: none"> Dikirimkan dalam bentuk hardcopy dengan format Ms.Word, Times New Roman 12, spasi 1,5, kertas ukuran A4 . Beri keterangan : judul tulisan, nama lengkap, alamat, pekerjaan, No. Telp/HP, email, dan bukti publikasi tulisan (koran, majalah, tabloid, online, dsb.). Karya tulis pernah dipublikasikan di media. 	<ul style="list-style-type: none"> Durasi maksimal 30 menit/film dengan format AVI atau MOV, ukuran minimal frame resolusi 720x576 px dan frame rate 25 fps. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, jika menggunakan bahasa asing atau daerah, wajib disertai subtitle bahasa Indonesia. Film dikirim dalam bentuk DVD/flashdisk, disertai sinopsis film, judul film, nama lengkap, alamat, pekerjaan, No. Telp/HP, dan email. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tim paduan suara terdiri maksimal 30 orang dan berdomisili di Indonesia. Paduan suara direkam dalam bentuk video dan setiap tim wajib membawakan 1 (satu) lagu Mars Tangguh - http://www.youtube.com/watch?v=lvh4lovX8mE - dan 1 (satu) lagu nasional pilihan peserta bertema bencana, kemanusiaan, lingkungan, inspirasi dan alam. Video dikirim dalam DVD/flashdisk, disertai nama tim paduan suara, No. Telp/HP, email, dan daftar nama serta keterangan singkat tim paduan suara.

SYARAT & KETENTUAN UMUM

- Tema dalam ruang lingkup kebencanaan (Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana) di Indonesia.
- Terbuka untuk umum dan bebas biaya pendaftaran
- Lomba ini tertutup untuk keluarga besar BNPB dan pihak panitia yang terlibat
- Pengiriman karya disertai fotokopi identitas.
- Karya Tulis, Foto, dan Film Dokumenter merupakan hasil karya yang belum

- pernah memenangkan perlombaan sejenisnya.
- BNPB berhak sepenuhnya menggunakan karya yang masuk ke panitia untuk keperluan publikasi dan promosi pihak penyelenggara.
- Peserta dianggap gugur bila diketahui melanggar persyaratan dan melakukan kecurangan seperti : plagiat, mencuri hak cipta, dan hal lainnya yang dianggap merugikan pihak lain.
- Karya yang dikirimkan tidak mengandung SARA dan

- unsur pornografi.
- Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.
- Batas akhir penyerahan karya tanggal 10 Oktober 2014, pada jam kerja.
- Pada amplop kiri atas, ditulis lomba apa yang diikuti.
- Para pemenang bersedia mengikuti rangkaian kegiatan pada anugerah "Tangguh Award 2014" dan pameran pemenang lomba foto/video terbaik.

• KARYA dapat dikirimkan ke:

Panitia Lomba Kreativitas
BNPB 2014
Pusat Data, Informasi, dan
Humas, Lantai 4
**Badan Nasional
Penanggulangan Bencana**
Jl. Ir. H. Juanda No. 36,
Jakarta Pusat 10120

Email :
humas@bnpb.go.id
anugerahbnpb@gmail.com



B N P B
www.bnpb.go.id



http://twitter.com/BNPB_Indonesia



<http://facebook.com/infobnpb>



<https://www.youtube.com/BNPBIndonesia>

